



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN MEMERIKSA JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN/ATAU
KETERANGAN BAWASLU, DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI**

JAKARTA

SELASA, 16 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan.

PEMOHON

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Beringin Karya (Perkara Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Demokrat (Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Pemeriksaan Persidangan Memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan/atau Keterangan Bawaslu, Dan Pengesahan Alat Bukti

Selasa, 16 Juli 2019, Pukul 08.10-11.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Nuzul Q. M.
Yunita R
Ananthia Ayu

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Mule

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

M Ridwan Ristomoyo

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Eko Perdana P.
2. Anneke DP Dolis
3. Anandya Dipo

D. Pemohon Perkara Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Sainuddin

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1. Muhammad Suyuth
2. Umar Hasan

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ahmar Ihsan R.
2. Arah Madani
3. Hazlan

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. M. Aliyas Ismail
2. Akhmad Rianto
3. Hendra F.

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Mursalin Jalil
2. Sulaiman Syamsuddin
3. Dede Arwinskyah

I. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Natalia Sahetapi

J. Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Jamaluddin Rustam
2. Yunius Pama'tan
3. Rony Hutahaean

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Sahroni

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. M. Nuzul Wibawa
2. Andi Walinga
3. Dipranto Tobok Pakpahan

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Muslimin Mahmud
2. Ardi
3. M. Natsir

N. Pihak Terkait Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Parulian Siregar
2. Noak Banjarnahor
3. IRFAN MAULANA

O. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 166-10-27 dan 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Much. Alfarisi
2. Rakhmat Mulyana

P. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 101-19-27 dan 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Imam Munandar
2. Tito Prayogi

Q. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 44-13-27, 151-02-27, dan 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Dedy Mulyana
2. Ibnu Shina

R. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 62-14-27 dan 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Dipo Lukmanul Akbar

S. TERMOHON:

1. Evi Novida Ginting Manik (Komisioner KPU RI)
2. Agustin Tri Setyani (Komisioner KPU RI)
3. Misna Hattas (KPU Sulawesi Selatan)
4. Upi Hastati (KPU Sulawesi Selatan)

T. Bawaslu:

1. Ratna Dewi Pettalolo
2. Adnan Jamal Syaiful Jihad
3. Azry Yusuf
4. Amriyadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.10 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb., om swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera. Kita akan melanjutkan persidangan dengan agenda dengan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan itu yang nanti akan disahkan.

Silakan, Ibu! Meskipun ada be ... mungkin 1 atau berapa Pemohon yang belum datang, Kita mulai persidangan ini. Kita sekalian saja nanti, kalau yang bersangkutan datang kita minta Petugas untuk membawa masuk.

Ya, silakan Pak! Ya.

Pagi ini kita akan mendengar tanggapan terhadap 9 permohonan yang akan di ... yaitu Pak ... untuk permohonan Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yaitu dari Hanura, Permohonan Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Berkarya, Permohonan Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Bulan Bintang, Permohonan Nomor 88 ... 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Keadilan Sejahtera, kemudian par ... Permohonan 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Golkar, lalu Permohonan 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrat, kemudian Permohonan 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Gerindra, dan kemudian Permohonan 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Persatuan Pembangunan.

Untuk itu sebelum sidang dimulai, silakan Para Pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu! Mulai dari Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Hanura, Silakan!

Pemohon ... Pemohon dulu! Ya, silakan, Pak!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MULE

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MULE

Selamat pagi untuk semua. Perkenalkan saya nama Ir. Mule. Nomor Perkara 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Selaku Pemohon dalam hal ini adalah perseorangan (...)

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu sudah!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MULE

Ya.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah cukup, perkenalan dulu. Ada lagi yang mendampingi Bapak atau ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MULE

Tidak ada, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sendiri?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MULE

Sendiri, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Dari PBB, Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Oh, belum ... belum datang? Partai Bulan Bintang?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA

Berkarya, Yang Mulia.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, sorry dari Partai Berkarya Nomor 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ya, silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA

Ya. Selamat pagi, Yang Mulia.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pagi.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA

Kami Kuasa Hukum Tim Berkarya.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA

Saya sendiri Eko Perdana Putra. Di belakang kami ada Anandya Dipo dan Anneke Putri Dolis.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EKO PERDANA

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian Partai Bulan Bintang, Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Hadir? Oh, ya itu mik di sampingnya, Pak. Silakan! Siapa, Bapak?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINUDDIN

Assalamualaikum wr. wb, Yang Mulia.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaaikumsalam wr. wb.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAINUDDIN

Saya Prinsipal Sainuddin.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAINUDDIN

Didampingi Kuasa Hukum, Muh. Suyuth dan Umar.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mana Kuasa Hukumnya?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAINUDDIN

Sementara (...)

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, belum ... belum tiba?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAINUDDIN

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, ya nanti kalau sudah masuk mohon diberitahukan kepada Petugas!

Ya, kemudian Partai Keadilan Sejahtera ... PKS? Belum hadir? Nomor 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kalau begitu kita teruskan dari Partai Golkar.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari DPP Partai Golkar hari ini hadir kuasanya, saya sendiri Aliyas Ismail, Hendra Firmansyah dan Akhmad Rianto.

Demikian, terima kasih.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Dari Partai Demokrat Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Selamat pagi, Yang Mulia.

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Selamat pagi.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Natalia Sahetapy dari Partai Demokrat. Satu rekan lagi belum hadir bernama Andi Ramlan, dia Kuasa Substitusi untuk Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.
Dari Gerindra, Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaaikumsalam wr. wb.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Selamat pagi bagi kita sekalian. Saya dari DPP Partai Gerindra, dalam hal ini mewakili Perkara Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya sendiri yang hadir, Sahroni.
Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Sendiri, Pak ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Sendiri, Majelis.

43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Terima kasih.
Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. NUZUL WIBAWA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia. Diwakili oleh saya sendiri, M. Nuzul Wibawa, sebelah kami Bapak Andi Walinga, dan sebelah kiri kami Bapak Tobok Pakpahan. Terima kasih.

45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya. Terima kasih.
Nomor 110-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Persatuan
Pembangunan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD

Assalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Waalaaikumsalam wr. wb.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD

Yang Mulia Majelis, mudah-mudahan pagi ini kita diberikan hidayah dan inayah untuk kita semua. Rekan-rekan Pemohon, Termohon dan Bawaslu, serta Terkait, yang kami hormati. Kami dari Pemohon, Pak, Perkara 110-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai PPP kami bertiga, Majelis. Saya sendiri Muslimin Mahmud, ada Ardi dan Pak M. Natsir.

49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD

Demikian, Majelis.

51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Lanjut ke Termohon. Satu-satu sebagaimana biasa.

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229-13-27, /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Baik. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam. wr. wb.

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-10-27 DAN 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati, Majelis Hakim Konstitusi, rekan-rekan Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Kami selaku Termohon hadir bersama kami Prinsipal kami, Ibu Evi Novida sebagai Komisioner KPU Republik Indonesia, kemudian dari bagian sekretariat KPU RI ada Ibu Agustin. Hadir juga KPU Sulawesi Selatan Ibu Misnah Hattas selaku Ketua, dan Ibu Upi Hastati selaku Komisioner. Saya, selaku Kuasa Hukum Termohon untuk Perkara Nomor 166/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Golkar, kemudian Perkara Nomor 229-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Berkarya. Saya sendiri, Much. Alfarisi, hadir bersama rekan saya, Bapak Rakhmat Mulyana. Untuk rekan-rekan dari kantor lain, kami persilakan!

55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan!

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27 DAN 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Terima kasih.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam.

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27 DAN 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Munandar, dan di ... rekan saya, Tito Prayogi di belakang. Kami dari Kantor HICON, yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama KPU RI khusus untuk Perkara Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan juga Perkara Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Waalaikumsalam. wr. wb. Silakan diteruskan!
Mohon dimatikan dulu, Pak. Ya.

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27, 151-02-27, DAN 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Waalaikumsalam.

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27, 151-02-27, DAN 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Saya hadir disini mendampingi dan sekaligus mewakili Termohon terkait dengan permohonan Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan Nomor 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 nanti PKS. Saya sendiri, Dedy Mulyana, bersama rekan saya, ada Pak Ibnu Shina dari Kantor Hukum Absar Kartabrata dan rekan.

Demikian, Yang Mulia.

63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terus masih ada?

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27, DAN 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya sendiri Dipo Lukmanul Akbar, dalam hal ini untuk Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Demokrat untuk Sulawesi Selatan, yang kedua, Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk PPP ... PPP untuk Provinsi Sulawesi Selatan.

Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Silakan! Masih ada di Termohon? Cukup? Ya, sudah, ya.

Sekarang Pihak Terkait. Silakan! Siapa yang sudah hadir dari Pihak Terkait? Bergilir saja, Pak, silakan! Siapa yang mau mulai pertama?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Assalamualaikum wr. wb., Yang Mulia.

67. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam. wr. wrb.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Saya, Kuasa Hukum dari Muhammad Dhevi Bijak, dalam Perkara 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat sebagai Pihak Terkait. Yang hadir, saya sendiri Dr. Jamaluddin Rustam, di samping saya, Yunius Pama'tan, dan satu lagi Roni Hutahaeen. Terima kasih, Majelis.

69. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih.

Silakan Bapak yang baru datang! Ya, mohon maaf, tempatnya agak sempit. Ya. Silakan dilanjutkan Pihak Terkait!

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUSLIMIN MAHMUD

Assalamualaikum wr. wb.

71. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam. wr. wb.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Perkenalkan, saya selaku kuasa hukum dari Partai Bulan Bintang dalam Perkara 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Dapil Takalar I.

73. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pihak Terkait?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA

Pihak Terkait.

75. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, untuk PP ... ya Pihak Terkait untuk PBB, ya.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA

Ya, sekian. Terima kasih.

77. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Masih ada? Silakan, Pak!

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULAIMAN SYAMSUDDIN

Assalamualaikum wr. wb.

79. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam. wr. wb.

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULAIMAN SYAMSUDDIN

Perkenankan, kami dari kuasa hukum DPP Partai Golkar. Mewakili Pihak Terkait dengan Nomor Perkara 166-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golkar Sulawesi Selatan. Yang hadir saya sendiri, Sulaiman Syamsuddin, rekan kami, Dede Arwinskyah, dan Mursalin Jalil. Terima kasih.

81. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ini internal, ya?

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULAIMAN SYAMSUDDIN

Internal.

83. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULAIMAN SYAMSUDDIN

Ya, Majelis.

85. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Perselisihan yang internal?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 166-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULAIMAN SYAMSUDDIN

Internal, Majelis.

87. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke, ya. Lanjut!

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Kami Tim Kuasa Hukum dari DPP Partai Nasdem, dalam Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagai Pihak Terkait

yang diajukan oleh Partai Pemba ... Persa ... PPP. Kami hadir di sini 2 orang. Saya sendiri Parulian Siregar dan sebelah kanan saya, Noak Banjarnahor. Terima kasih, Yang Mulia.

91. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Masih ada Pihak Terkait yang belum? Sudah?
Oh, ini, Bapak dari Pemohon yang baru datang? Siapa? Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu!

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH. SUYUTHUYUTH

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
Perkenankan kami memperkenalkan diri. Kami selaku Pemohon, datang bertiga. Di sebelah kiri saya, Pak Umar Hasan Kuasa dari Pemohon, kemudian prinsipal dan ... namanya Pak Sainuddin, dan saya sendiri, Muhammad Suyuth. Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Untuk perka ... perkara nomor berapa, Pak Pemohon?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH. SUYUTHUYUTH

Perkara Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

95. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Bulan Bintang, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH. SUYUTHUYUTH

Baik, Yang Mulia. Ya.

97. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Ada lagi yang belum memperkenalkan diri? Silakan dari Pemohon yang tadi mungkin terlambat.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO

Assalamualaikum wr. wb.

99. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam. wr. wb.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD RIDWAN RISTOMOYO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya, Muhammad Ridwan Ristomoyo, dari DPP Partai Hanura, Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Sulawesi Selatan atas nama Harun Rani. Terima kasih, Yang Mulia.

101. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Masih ada di Pemohon yang belum memperkenalkan diri? Sudah, ya?

Silakan sekarang Bawaslu!

102. BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

103. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam. wr. wb.

104. BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO

Kami dari Bawaslu hadir, saya Ratna Dewi Pettalolo Anggota Bawaslu Republik Indonesia. Hadir pula Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan Adnan Jamal Koordinator Divisi Hukum, Azry Yusuf Koordinator Divisi Penindakan, dan Amriyadi Koordinator Divisi Pengawasan. Terima kasih, Yang Mulia.

105. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Ibu. Sekaligus saya sampaikan kepada Bawaslu untuk Bawaslu Daerah yang belum mendapatkan surat tugas, mohon segera disusulkan, ya? Nanti dicek siapa saja yang belum ada surat tugasnya dan diserahkan kepada Mahkamah. Ya nanti setelah selesai persidangan saja, ya. Atau mau sekarang diambil kalau sudah ada, boleh. Silakan di ... kalau sudah ada, silakan Petugas. Baik, terima kasih. Di ... langsung dibawa ke panitera untuk dicek nanti.

Ya, baik kita mulai ... untuk perkara yang pertama Nomor 44/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Hanura, untuk itu mohon kesediaan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo untuk memandu, ya? Terima kasih.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRA FIRMANSYAH

Mohon izin, Majelis.

107. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRA FIRMANSYAH

Sebelum pembacaan ... jawaban dari Pihak Termohon dan Terkait, keterangan Bawaslu, kami ingin mengajukan permohonan penarikan kembali Register 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

109. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari mana, Pak?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRA FIRMANSYAH

Dari Partai Golkar, Majelis.

111. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari Partai Golkar?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRA FIRMANSYAH

Siap.

113. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mohon dicatat Petugasnya nanti sekalian, yang 166/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRA FIRMANSYAH

166/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Majelis.

115. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, jadi permohonan ditarik kembali? Ditarik?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRA FIRMANSYAH

Baik. Khusus pengisian Anggota DPRD Sulawesi Selatan Dapil I Makassar A, Partai Golkar atas nama Drs. H. A. Kadir Halid Nomor Urut 1, Majelis.

117. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Khusus untuk?

118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRA FIRMANSYAH

Dr. H., Dapil Sulsel I, Makassar A, Golkar, atas nama Drs. H. Abdul Kadir Halid Nomor Urut 1, Majelis.

119. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan di dalam, gitu kan? Baik, terima kasih. Itu saja, ya? Baik. Ada surat penarikannya? Mohon Petugas diambil surat penarikannya. Ya, ini jadi dokumen walaupun pernyataan di dalam persidangan itu pun tidak kalah ... sama kuatnya, tetapi kalau ada buktinya akan lebih bagus. Silakan, Yang Mulia! Terima kasih.

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Izin, Majelis?

121. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, dari mana ini?

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Dari Termohon, Partai Golkar.

123. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Nanti kami boleh meminta copy penarikannya

125. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, boleh, boleh, tentu saja boleh.

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Terima kasih, Majelis.

127. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, dimulai untuk 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? Siapa yang mau menyampaikan 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini?

129. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Kami, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, jadi sebelumnya saya cermati jawaban Anda untuk eksepsi, yang pertama, Mahkamah tidak berwenang karena ini menyangkut proses. Kemudian yang kedua mengenai error in pesona karena menarik KPU Enrekang II sebagai Termohon II. Betul, ya?

131. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Betul.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian pokok permohonan mengenai enre ... Dapil Enrekang III dan Banteng III, langsung saja ke pokok permohonan!

133. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, baik. Untuk pokok permohonan Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Enrekang III Kabupaten Enrekang.

Pertama, kami Termohon menyajikan untuk tabel persandingan, yaitu perolehan suara menurut Termohon dan menurut Pemohon. Dalam tabel Pemohon, Pemohon atau Ir. Mule mendapatkan=160 suara dan Sudarmin Tahir mendapat=100 ... maaf, 949 suara. Ada selisih 11 di antara calon.

Kemudian menurut Termohon, Nomor Urut 4, Sudarmin Tahir memperoleh suara=966, sementara Nomor 1, Ir. Mule=960. Ada selisih minus 6. Bahwa menurut Termohon, tabel persandingan yang benar atas selisih jumlah suara tersebut seharusnya adalah Nomor Urut 1, Ir. Mule, menurut Pemohon 960, menurut Termohon 960. Ini tanpa selisih. Kemudian, menurut Termohon Nomor Urut 2 Drs. Syamsir, menurut Termohon perolehan suaranya 111, begitupun menurut Pemohon 111, tanpa selisih. Langsung ke Nomor 4, yang dimaksud, Majelis. Sudarmin Tahir=949 menurut Pemohon, menurut Termohon=966, ada selisih 17, ini tabel yang benar menurut Termohon.

Kemudian di Tabel 2, kami menyajikan persandingan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tiap-tiap kecamatan pada

TPS yang disebutkan dalam desa tertentu, Yang Mulia. Jika diperkenankan, bisa dianggap dibacakan?

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Boleh

135. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, jadi kami langsung untuk tabel 2 ini termasuk rinciannya, dibacakan (...)

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tiap kecamatan?

137. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, tiap kecamatan, dianggap dibacakan. Selanjutnya pada angka 1, halaman 6 (...)

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dalil?

139. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, dalil ... menyebut dalil. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, ya menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon Ir. Mule di Dapil Kabupaten Enrekang III adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan fakta hukum, suara Pemohon Ir. Mule, tidak ada pengurangan, baik di TPS, Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle sampai dengan rekapitulasi di tingkat KPU Enrekang.
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di Dapil Kabupaten Enrekang III untuk Pihak Terkait dalam hal ini Sudarmin Tahir adalah tidak benar berdasarkan fakta hukum tidak ada penambahan suara manapun. Baik di TPS Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle sampai tingkat rekapitulasi di KPU Enrekang.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

141. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

3. Bahwa yang benar berdasarkan rekapitulasi suara TPS Kecamatan dan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan adalah Ir. Mule 960=suara.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

143. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Dan Terkait Sudarmin Tahir=966 suara, berdasarkan (...)

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah tadi itu.

145. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Berdasarkan form DB-1 KPU Enrekang. Yang selanjutnya (...)

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Akumulasinya ada di tabel tadi, kan?

147. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, di tabel, ini narasinya, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

149. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Nah, poin 4 ini adalah penjelasan atau narasi tiap-tiap TPS untuk membuktikan bahwa perselisihan suara itu tidak terjadi.

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

151. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Jadi, kami anggap dibacakan.

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Bantaeng III.

153. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Sampai dengan halaman 20.

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, 20?

155. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, ini semuanya adalah narasi terkait perselisihan tiap-tiap TPS, Yang Mulia.

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

157. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya. Eh, maaf bukan 20, ya. 10.

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Makanya Anda kok mau lewat Bantaeng itu bagaimana? Narasikan dulu dong, angka dan narasi 1, 2, dalil kan cukup.

159. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, baik. Di angka 5, Yang Mulia.

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

161. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

No ... halaman 10.

Bahwa semua yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti dan permasalahan ini telah diajukan sebelumnya ke Bawaslu dengan putusan ditolak, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang pada tanggal 27 Mei 2019 Nomor 007/ADM dan seterusnya terkait pelaporan Pemohon untuk rekapitulasi tingkat kabupaten, yang kesemuanya memutuskan bahwa KPU dan jajaran penyelenggara ad hoc sudah melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan prosedur.

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tidak terbuktilah. Langsung ke Bantaeng Dapil III, Pak.

163. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Baik, Yang Mulia.

Untuk Dapil III Kabupaten Bantaeng ada persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bantaeng. Menurut Pemohon ini disajikan dalam bentuk tabel.

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

165. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Terkait selisih suara antara Partai Kebangkitan Bangsa yang perolehan suara menurut Termohon=2.336 sementara menurut Pemohon adalah=2.265.

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

167. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ada selisih plus 71 dan sementara Parpol Hanura, menurut Termohon perolehan suaranya=2.269, menurut Pemohon=2.333, minus=64 suara.

168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada ... ya.

169. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Tabel berikutnya, adalah sandingan menurut Termohon.

170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan ini.

171. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Dianggap dibacakan. Begitupun tabel berikutnya yang ke-3.

172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itukan break down-nya per kecamatan, kan?

173. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, betul, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Akumulasinya yang tadi. Oke, dalilnya dibacakan.

175. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Dalilnya beberapa poin pokok, kami izin untuk dibacakan.

176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan!

177. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil III Kabupaten Bantaeng sebanyak 64 suara, tidak terbukti kebenarannya.
2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi parpol lain PKB di Dapil III Kabupaten Bantaeng sebanyak 71 suara, tidak terbukti kebenarannya.
3. Bahwa yang benar adalah suara Pemohon Partai Hanura sebanyak 2.333 suara, dan partai Terkait sebanyak ... eh maaf, PKB sebanyak 2.265 suara.

178. HAKIM ANGGOT A: SUHARTOYO

Ya.

179. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Begitupun, terhadap dalil-dalil berikutnya ini merupakan narasi penjelasan dari tiap-tiap locus yang dipersoalkan.

180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

181. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

TPS, desa, dan kecamatan itu dianggap dibacakan.

182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ada ... anu apa ... di Bantaeng rekomendasi atau apa, persoalan yang agak khusus?

183. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Kejadian khusus.

184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang berkaitan dengan rekomendasi.

185. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ada, Yang Mulia. Di angka 15 halaman 21.

186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, dibacakan.

187. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Dalil Pemohon pada angka IV, angka 15, halaman 36, yang pada pokoknya mendalilkan perihal informasi dari saudara Sudirman tentang salinan C-1 itu tidak terbukti kebenarannya.

Ini penjelasannya adalah (...)

188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

189. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Berdasarkan proses pembuktian dalam pemeriksaan atas adanya laporan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Bantaeng sepanjang

menyangkut pemasangan salinan C-1 di TPS atau pengumuman hasil penghitungan suara di tempat yang mudah diakses publik telah dilakukan oleh KKPS dan/atau oleh seluruh TPS wilayah Kecamatan Tompobulu secara patut dan sesuai ketentuan yang berlaku. Di samping itu Termohon in casu PPK Kecamatan Tompobulu tidak pernah melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara di salinan C-1 secara melawan hukum. Review yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tompobulu dalam tahap persiapan menjelang pelaksanaan rapat rekapitulasi, secara teknis tidak dengan cara merubah isi naskah di salinan C-1 yang diterima dari KPPS melalui TPS, yang dimasukkan ke dalam amplop dan berada di luar kotak suara.

Review yang dilakukan oleh PPK adalah dengan cara menotasi dan menyusun catatan atas naskah salinan C-1 di lembar kertas terpisah, yang menurut penalaran yang wajar dalam dan logis, matematis diduga terdapat kekeliruan dalam pencatatan dan/atau penjumlahan angka atau huruf dan sangat jarang dan tidak boleh melakukan review dengan cara mencocokkan angka yang ada pada salinan C-1 dengan angka yang ada pada C-1 Plano, karena berarti melakukan setelah membuka kotak suara yang tersegel dan terbukti ... terkunci dalam keadaan terkunci.

190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini intinya enggak terbukti enggak ada pelanggaran, ya?

191. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Tidak terbukti.

192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik prosedur, mekanisme, berkaitan dengan administrasi.
Baik, langsung ke petitum, Pak.

193. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Baik.

194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk apa itu dijelas-jelasin, sudah enggak ada rekomendasi

195. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Baik, ya. Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

197. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya.

Berdasarkan seluruh tanggapan yang telah diuraikan oleh Pihak Termohon, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan.

Dalam eksepsi, megabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian, dua, menguat ... menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional tertanggal 21 Mei 2019.

Tiga, menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan ... menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD ... ini ada pengulangan ... Kabupaten Bantaeng Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III yang benar. Dapil en ... Kabupaten Enrekang III, Ir. Mule=960, dan Sudirman Tahir=966.

198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

199. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Lengkapnya dalam tabel, dianggap dibacakan.

200. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

201. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Kemudian, untuk Dapil Sulsel III Kabupaten Bantaeng, Partai Hanura ...n maaf ... Partai PKB=2.336 dan Hanura=2.269. Dalam tabel secara lengkap, dianggap dibacakan.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Tertanda Tim Kuasa Hukum Termohon. Demikian.

202. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

SK KPU 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 apa 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, Pak?

203. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, ini direnvoi enggak?

205. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Oh, ya, renvoi.

206. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Renvoi, ya. Ini kan Hakimnya baik ini kalau ... 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, ya?

Ya, baik. Ini pe ... kalau sudah minta Surat Keputusan KPU itu dinyatakan benar, kenapa minta ditetapkan? Ada sesuatu dia? Yang amar 3 itu. Amar 2 kan minta ditetapkan ... dibenarkan SK KPU-nya?

207. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya.

208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kok kemudian, minta ditetapkan? Memang ada apa yang sudah minta dibenarkan itu? Melapis?

209. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Untuk semakin menegaskan saja isi daripada keputusan yang kedua.

210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Seperti meragukan SK-nya sendiri kalau begitu kan?

211. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Jangan, Pak.

212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Loh Anda ini, saya hanya minta ... boleh. Ini enggak ada Pihak Terkait, ya? Langsung Bawaslu. Silakan siapa yang mau menyampaikan? 5 menit sampai 7 menit.

213. BAWASLU RI: RATNA DEWI PETTALOLO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Akan disampaikan oleh Bawaslu Sulawesi Selatan.

214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Stressing-nya pada 2 dapil tadi, Pak. Ada kejadian apa? Kemudian, apa yang sudah diambil langkah-langkah untuk (...)

215. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perkenankan kami untuk menerangkan hasil pengawasan atau keterangan kami dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk Kabupaten Enrekang karena ada 2, yaitu berkaitan dengan Pemohon atas nama Ir. Mule dan Andi Harun Rani.

216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

217. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Berturut-turut secara detail kami sampaikan keterangannya sebagai berikut:

1. Kami mulai dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan atas kedua Pemohon tersebut dari Partai Hanura. Sebagaimana di Nomor Register Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, pada kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditemukan dugaan pelanggaran perolehan suara terkait temuan dan (ucapan tidak terdengar jelas) berkaitan dengan perolehan suara Partai Hanura. Itu dari ... untuk tingkat Provinsi.

2. Khusus untuk keterangan kami untuk di Kabupaten Enrekang terkait dengan pokok permohonan dari nama Pemohon Ir ... Bapak Ir. Mule. Bahwa di TPS 12 ... di TPS 12 Kelurahan ... Kecamatan Alla yang didalilkan. Jadi, kami ingin mempertegas di sini bahwa yang dipersoalkan adalah di TPS 12 Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla. TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla. TPS 04 Desa Tongkonan Basse, Kecamatan Masalle. TPS 01 Desa Batu Kede, Kecamatan Masalle.

Nah, hasil pengawasan dari jajaran kami di Kabupaten Enrekang ... Bawaslu Kabupaten Enrekang, kami sampaikan sebagai berikut.

Bahwa pada TPS 04 Tongkonan Basse, Kecamatan Masalle, PPK membuka C-1 Plano atau ketidaksesuaian C-1 Hologram dan salinan C-1 Saksi. Bahwa berdasarkan C-1 Plano terdapat perolehan suara Andi Sudarmin Tahir Nomor Urut 4 sebanyak 6. Namun, berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 04 Tongkonan Basse bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dugaan pelanggaran.

Lanjut, bahwa pada ... begitu juga di ... apa ... di ini bisa kita lihat di halaman 31, 32 PK-27.16-26. Selanjutnya, khusus untuk TPS 01 Batu Kade ... Batu Kede Kecamatan Masalle, pada rekap kecamatan itu juga tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran selama proses penghitungan dan ... perolehan dan penghitungan suara. Itu dapat dilihat pada halaman 32, 33 di keterangan kami dan PK.27.16.26.

218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Keterangan cuma sampai halaman 24, Anda itu.

219. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ya, baik. Mengenai dari tindak lanjut temuan dan laporan berkaitan dengan tindak lanjut temuan dan laporan. Bawaslu Kabupaten Enrekang telah menindaklanjuti laporan yang dicatat dan diregistrasi, ada 3 di sini. Ada nomor 003, dan seterusnya, Yang Mulia. Dapat dilihat pada halaman 35 sampai halaman 36 yang ... sebagaimana yang di ... ditunjukkan oleh Bukti PK-27.16.30

Nah, atas dasar tersebut Terbukti mel ...Terlapor ... Terlapor dalam ... dalam proses penyelesaian administrasi cepat Terlapor PPK Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle, tindak lanjutnya Terlapor terbukti melakukan pelanggaran prosedur dan mekanisme tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan diberikan teguran tertulis kepada Terlapor.

Selanjutnya, teta ... dari ... dari putusan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Enrekang, dan seterusnya. Yang kedua (...)

220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak, apa itu? Ditindaklanjuti apa bentuknya?

221. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ditindaklanjuti hasil putusan karena hasil putusan di sini, Yang Mulia, bahwa Terlapor (...)

222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terlapor terbukti atau tidak?

223. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Terlapor terbukti, Yang Mulia. Untuk menindaklanjuti ... dilakukan penyandingan.

224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

225. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Jadi ... jadi, khusus untuk ini tindakla ... apa ... PPK karena ini PPK Terlapornya, Yang Mulia. PPK Kecamatan Alla dan PPK Kecamatan

Masalle. Nah, hasil dari tindak lanjut tersebut ini kan di rekap kabupaten, KP ... terhadap putusan tersaksi Hanura tetap tidak menerima dari keberatan tersebut.

226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

227. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Dari ... atau dari tindak lanjut tersebut, makanya dimin ... meminta penghitungan suara ulang atau pengu ... penghitungan suara ulang surat suara. Akan tetapi KPU Kabupaten Enrekang tidak mengakomodir sehingga saksi Hanura melapor lagi ke ... ke Bawaslu Enrekang. Yang dicatat dalam register nomor 007 yang ... 007, dan seterusnya. Ini dapat dilihat, Yang Mulia, pada halaman 34, 35 PK-27.1.29 dengan pelapor atas nama Ir. Mule dan terlapor adalah KPU Enrekang.

Bahwa atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Enrekang menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi tersebut, dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa Bawaslu be ... Bawaslu Kabupaten Enrekang berkesimpulan mem ... dan memutuskan bahwa tidak ditemukan bukti yang cukup.

228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

229. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Dan seterusnya, dan ... dan berdasarkan hukum bahwa terlapor terbukti secara sah dan ... Nah, ini kesimpulannya atau amarnya. Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan me ... prosedur mekanisme tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga dapat dilihat di keterangan kami pada halaman 35-36, PK-27.1.20.

230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PK?

231. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

PK-27.1 (...)

232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang tidak terbukti tadi, PK-26.16-29.

233. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ya. Siap, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang 27, yang mana?

235. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Yang 27 yang (...)

236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

27 ... PK-27.16-30

237. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ya, Yang Mulia.

238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukti Anda itu.

239. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

007.

240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

007, mana lagi?

241. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Untuk ... kan, ada beberapa keputusan, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Tapi, yang disebut untuk bukti penyandingan argumen Anda Bapak itu, PK-27.16-30 buktinya.

243. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Oh ya, Yang Mulia. Persis, Yang Mulia.

244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Jadi, itu tidak ada persoalan, akhirnya tidak ... tidak ada pelanggaran yang di Enrekang?

245. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Persis, Yang Mulia.

246. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau begitu, pindah yang Bantaeng! Yang Bantaeng III.

247. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Bantaeng juga, Yang Mulia. Khusus untuk Kabupaten Banra ... Bantaeng berkaitan dengan Andi Harun Rani, yang mempersoalkan di perolehan apa ... ada yang persoalan yang berkaitan dengan 1 kecamatan.

248. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

249. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Di ... yaitu Kecamatan Tompobulu. Pada kesimpulan kami, setelah melalui proses pengawasan di rekap berjenjang yang dilaporkan oleh jajaran kami, baik di tingkat kelurahan, desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten itu tidak ditemukan dugaan pelanggaran. Itu kesimpulannya, Yang Mulia.

250. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

251. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Sesuai dengan keterangan kami. Termasuk juga kami sampaikan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan juga te ... pernah menerima laporan

terkait hal ini, yaitu bis ... yaitu terlapor PPK Kecamatan Tompobulu dan Bawaslu Kabupaten Bantaeng. Itu tertera di Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan 001 dan itu tidak terbukti ada du ... terbukti melakukan pelanggaran di Kecamatan Tambopulu yang berkaitan dengan (...)

252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

253. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Pokok permohonan dari Pemohon.

254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

255. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Terima kasih, Yang Mulia.

256. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sama-sama. Itu, Pak Ketua! Terima kasih.

257. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Karena tidak ada Pihak Terkaitnya, saya me ... memberikan catatan tentang bukti saja. Untuk yang diajukan oleh Pemohon, buktinya itu ada catatan dari kami. Saudara mengajukan Bukti 1 sampai dengan 78, ya? (ucapan tidak terdengar jelas) betul?

Kemudian, P-9 ... P-8 dan P-9-nya itu belum dileges, sehingga tidak bisa ikut kami sahkan. Lalu, Bukti P-73 dan 78 ... sampai 78, itu softcopy file-nya tidak terbaca, Pak. Nanti tolong diperbaiki dulu! Ya. Tidak terbaca ininya, jadi itu. Nah dan nanti sekaligus dibuat formatnya di ... di dalam bentuk Ms. Word Pak, ya? Nanti, ya? Supaya bisa dibaca. Nah, selain itu buktinya kami sahkan.

KETUK PALU

Kemudian, perkara nomor ... untuk Termohon ada 12 alat bukti yang ... yang diajukan. Yaitu dari 001 Enrekang III, Hanura 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan seterusnya itu, sampai dengan nomor berapa ini? Sampai dengan 012, ya? Dari 001 sampai dengan

012. Dengan kode yang sama, panjang itu yang menyangkut Enrekang. Betul begitu, ya?

258. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Betul, Yang Mulia.

259. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu sudah tidak ada masalah. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Bantaeng yang Dapil III, Saudara Termohon mengajukan bukti dari 001 sampai dengan 006 ya.

260. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, betul.

261. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya?

262. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Betul, Yang Mulia.

263. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi, ada catatan kami yang Bukti 004 itu. Bukti fisiknya tidak ada, yang rekomendasi Bawaslu Nomor 162 itu di keterangan ininya. Nah, ada juga pelabelan yang keliru ya, tapi ... tapi, itu anu ... teknis, ya? Yang seharusnya 006 Enrek ... Bukti 006 Enrekang dan Ban Ban ...Bantaeng III itu ... Hanura 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu seharusnya 006 Banteng III, Hanura 14-44-13-27, gitu. Itu nanti disesuaikan saja.

Kemudian, bukti dari Pihak Terkait? Tidak ada, ya? Tidak ada bukti pihak. Dari Bawaslu? Karena tidak ada. Dari Bawaslu, Anda mengajukan Bukti PK-00-13 sampai dengan PK-27.16-31. Betul, ya? Itu, catatan kami hanya begini saja.

264. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Persis, Yang Mulia.

265. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, betul.

Kemudian, yang untuk 27.00-13 itu, itu adalah laporan hasil pengawasan Nomor 0032/LHP, Perihal Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi, itu fisiknya belum ada, Pak. Nanti dilengkapi!

266. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Siap, Yang Mulia.

267. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kemudian ada perbedaan sih antara yang 1 lagi kemudian yang untuk PK-27.324 itu ada perbedaan antara judulnya dengan apa namanya ... dengan yang menyangkut nomor ini. Kalau di (...)

268. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ada daftar renvoinya, Yang Mulia.

269. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti di nomornya itu yang ... yang berbeda dengan (...)

270. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ya.

271. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya daftar dan isinya juga otomatis jadi berbeda kan karena nomor yang dirujuk berbeda itu nanti ininya.

272. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Persis ... persis, Yang Mulia.

273. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian, Bawaslu juga menambahkan bukti Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, untuk TPS 012 Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla. TPS 8 Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla. TPS 04 Kelurahan Tongkonan Basse, Kecamatan Masalle. TPS 001 Kelurahan Batu Kede, Kecamatan Masalle dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 056. Lalu, (...)

274. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Persis, Yang Mulia.

275. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, betul, ya?

276. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Persis, Yang Mulia.

277. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul. Kemudian, ada PK-27.16-28, itu Anda menambahkan Bukti Berita Acara Nomor 173/PY, dan seterusnya. Ya?

278. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Persis, Yang Mulia.

279. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul.

280. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Disisipkan, Yang Mulia.

281. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Jadi, itu semuanya, kecuali yang saya berikan catatan tadi yang tidak ada bukti fisik sama yang berbeda antara daftar ... daftar dan isinya itu sudah kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih.

282. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

283. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kita lanjut ke (...)

284. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Yang Mulia?

285. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

286. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Izin. Termohon izin, Yang Mulia.

287. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

288. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Mohon kami bisa di ... memperoleh keterangan dari Pihak Bawaslu, Terkait.

289. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, belum dapat, ya?

290. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Belum dapat, Yang Mulia.

291. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya. Boleh tentu saja ya.

292. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Terima kasih.

293. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaupun ... walaupun sudah di-upload juga ya. Tapi, nanti silakan lah diini.

Untuk yang Nomor 2, dari Partai Beringin Karya. Mohon berkenan, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams untuk memandu. Terima kasih.

294. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Kita lanjut ke Perkara 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk jawaban Termohon dan juga keterangan Bawaslu terhadap Pemohon, Partai Berkarya.

295. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

296. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan!

297. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA

Atas kesempatannya. Register 229 terdiri dari 2 APPP yang pada persidangan tanggal 9 kemarin yang APPP 225 di ... tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Untuk itu yang kami sampaikan yang APPP 231. Dalam eksepsi.

298. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, singkat saja!

299. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

300. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

301. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA

Bahwa Pemohon dalam APPP 231 atas nama Nurhidayah tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapat persetujuan dari ketua umum dan sekjen partai. Bahwa permohonan Pemohon dan ... seakan-akan bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya, akan tetapi sesuai dengan posita dan permohonannya pada halaman 8 sampai 7 perbaikan permohonan, Pemohon mendalilkan permasalahan perolehan suara perseorangan.

302. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kemudian?

303. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA

B. Eksepsi melewati tenggang waktu.

304. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

305. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA

Perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Jumat 31 Mei 2019 pukul 15 ... 13.59 WIB telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan.

306. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

307. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA

Bahwa APBL Nomor 253 tertanggal 28 Mei 2019 dibuat pada pukul 10.00 WIB. Disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dalam jangka waktu 3x24 jam sejak APBL diterima. Artinya, batas waktu perbaikan permohonan ialah sampai 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB. Oleh karenanya telah lewat waktu. Kemudian permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK. Bahwa Pemohon atas nama Nurhidayah hanya mengajukan permohonan tanpa sti ... mohon maaf ... oh, ini 225.

Lanjut dalam pokok perkara, Yang Mulia. Bahwa pada pokoknya, pemohon mem ... ber ... permasalahan tentang selisih suara Pemohon dalam permohonannya ... dalam C-1-nya dikatakan mendapat=951 suara, sedangkan dalam DB-1=942 suara, sehingga terdapat selisih=9 suara. Selisih tersebut terdapat di 3 TPS, yaitu TPS 02 Desa Pitue, Kecamatan Marang, TPS 12 Attang Salo, Kecamatan Marang, dan TPS 7 Tamangapa, Kecamatan Marang.

Untuk seluruh dalil-dalil Pemohon, Termohon menyatakan menolak seluruhnya dan yang benar menurut Termohon adalah sesuai dengan poin 22 halaman 9. Setelah ditersuri ... ditelusuri dan dilakukan penyandingan data dari semua dokumen perhitungan, Formulir Model C1-DRPD Kabupaten/Kota, C-1 Plano, DAA-1 dari tingkat TPS hingga Kecamatan, yang benar menurut Termohon ialah sesuai dengan tabel di halaman 10.

308. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya (...)

309. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA

Kami bacakan (...)

310. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

02, 07 (...)

311. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA

TPS 02, TPS 07, TPS 12, dan perolehan suara tingkat kab ... kecamatan dan kabupaten/kota.

312. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

313. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA

Kemudian terakhir, di poin 24. Bahwa pada proses rekapitulasi tingkat kabupaten/kota tidak ada sanggahan ataupun komplain dari saksi Berkarya yang selalu hadir dalam proses rekapitulasi, dan menerima semua proses hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh Termohon.

Petitum.

Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan terhadap permohonan Pemohon APP 225 dan APP 231.

Dalam eksepsi.

1. Menyatakan menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak pomor ... permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan KPU Nomor 987 dan seterusnya ... dan seterusnya.

Atau

Apabila Mahkamah berprantet ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ... mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

314. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Terima kasih. Terkaitnya tidak ada. Lanjut ke Bawaslu!

315. BAWASLU SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Baik. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Majelis Yang Mulia, saya dari Bawaslu Sulawesi Selatan sekaitan dengan permohonan dari Partai Berkarya yang pada pokok permohonannya bahwa terdapat selisih suara Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 8 di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan daerah pemilihan Pangkajene dan Kepulauan III untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene telah melakukan pengawasan dengan proses penguasaan secara berjenjang. Mulai dari proses perhitungan suara hingga rekapitulasi di tingkat kabupaten

sampai di tingkat provinsi tidak ditemukan adanya selisih suara, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada posita.

Selanjutnya, dari proses-proses itu memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan proses yang ditangani oleh Bawaslu terhadap beberapa laporan. Namun, Bawaslu perlu menjelaskan bahwa selama proses pelaksanaan rekapitulasi, untuk beberapa ... beberapa ... dari 13 kecamatan, ada beberapa proses perbaikan atau daftar inventarisasi masalah yang ber ... terkait adanya beberapa kesalahan pencatatan administrasi, namun tidak mempengaruhi perolehan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden. Demikian pula dengan perolehan Calon Legislatif secara berjenjang.

316. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Lanjut, yang (...)

317. BAWASLU SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Bah (...)

318. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

319. BAWASLU SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Bahwa sekaitan dengan hal tersebut pula, Bawaslu Kabupaten Pangkajene Kepulauan dalam proses telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi dan telah melakukan penanganan dengan laporan tertanggal 6 Mei 2019. Pelapor atas nama Nurhidayah, ini dapat kita lihat pada keterangan Bawaslu halaman 718 untuk Buktinya PK-27.10- (...)

320. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini halamannya tidak ada ini (...)

321. BAWASLU SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Halaman 700 (...)

322. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dimana ini, Pak, halamannya ini? Ini kopian tapi tidak ada halaman yang terkait (...)

323. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ini ... ini aja coba. Poin berapa itu?

324. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Nurhidayah itu, ya (...)

325. BAWASLU SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

PK-27.10-35. 10 sampai 35.

326. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

327. BAWASLU SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Bahwa berdasarkan putusan pendahuluan terhadap laporan yang telah diregister dengan Nomor 004 dan seterusnya ... Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada rapat pleno telah menetapkan:

1. Menyatakan laporan pelanggaran administrasi pemilu dengan Nomor Register 004 dan seterusnya, diterima.
2. Menyatakan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor register 004, dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dan hasil pemeriksaan terhadap laporan nomor 004 yang dimaksud itu, Bawaslu Kabupaten Pangkajene Kepulauan telah mengeluarkan amar putusan. Pertama menyatakan menolak permohonan Pemohon, pelapor ... permohonan pelapor untuk seluruhnya, dan menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilu. Hal ini dapat dilihat pada keterangan Bawaslu nomor ... halaman 719 sampai 720 dengan ke Bukti PK-27.10-35. 10 sampai 35.

Saya kira demikian keterangan dari Bawaslu sekaitan dengan permohonan Partai Berkarya. Terima kasih

328. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan, Pak Ketua, untuk bukti dan alat buktinya.

329. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih, Yang Mulia, Pak Wahiduddin Adams. Ini beberapa ... apa ini ... kartu advokat dari Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon ini belum lengkap, ya? Nanti tolong dilengkapi, ya? Untuk kuasa Pemohon dan Termohon ... apa namanya ... kartu advokatnya maksudnya.

330. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA

Baik, Yang Mulia.

331. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Kemudian untuk bukti dari Termohon itu tidak ada persoalan. Cuma saya mau konfirmasi saja, itu Anda mulai menyerahkan bukti dari T-001 Pangkajene dan seterusnya sampai dengan T-007 Pangkajene dan seterusnya. Betul?

332. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT MULYANA

Betul, Yang Mulia.

333. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, bukti yang disampaikan pada kami itu, mulai dari PK-27.10-01 – PK-27.10-38? Baik.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Kita lanjut ke yang nomor 3, mohon berekanan, Yang Mulia, Pak Suhartoyo untuk Partai Bulan Bintang Perkara 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

334. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Ini perkara perorangan ya? Perseorangan? Baik, jadi di jawaban KPU untuk eksepsi menyangkut obscur katanya. TSM tapi tidak menjelaskan locus, tempus, maupun modusnya. Kemudian yang kedua, cacat formil permohonan karena yang

pertama tidak memenuhi sistematika permohonan. Kemudian tidak ada penyandingan. Betul, ya?

335. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Betul, Yang Mulia.

336. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, kemudian dalil Pemohon cuma berkaitan dengan Daerah Sinjai II?

337. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Ya.

338. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa jawaban Anda? Langsung saja!

339. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Inggih, terima kasih. Sebelumnya, Yang Mulia, sebelum masuk ke pokok permohonan, ada renvoi, Yang Mulia.

340. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di halaman berapa?

341. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Di introduksi ... halaman 2, Yang Mulia. Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang. *Advokat magangnya* dicoret, Yang Mulia.

342. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Advokat?

343. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Magang, karena ke semua dari 16 penerima kuasa ini adalah advokat, Yang Mulia.

344. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa? Takut ada pengusiran? Enggak ... kalau disini tidak advokat pun boleh kok (...)

345. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Oh, kebetulan (...)

346. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak harus advokat beracara di MK itu.

347. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Ya, tapi ini kebetulan kami advokat semua, Yang Mulia.

348. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kebetulan advokat. Alamatnya tidak disebut, Jl. Mangga 3 ini?

349. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Ya

350. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kocoran, Sleman, Enggak?

351. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Kocoran, Sleman, Yang Mulia. Kami dari Jogja, Yang Mulia.

352. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya dari Bali sih. Oke lanjut yang dapil 3 Sinjai tadi.

353. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Masuk ke dalam pokok permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten di beberapa daerah pemilihan menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1 Provinsi Sulawesi Selatan dapil Sinjai.

354. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sinjay II?

355. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Ya. Bahwa dalil Pemohon angka 1 halaman 5 permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasarkan ... tidak berdasar hukum sebab Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kecurangan yang bersifat struktur, sistematis, dan masif tersebut baik pelaku, tempat kejadian, maupun waktu terjadinya peristiwa.

356. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

357. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Dua. Bahwa dalil Pemohon angka 2 halaman 5, permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum adapun yang benar menurut Pemohon adalah perolehan suara caleg Partai Bulan Bintang Dapil II Nomor Urut 3 atas nama Hasnah, S.Sos., adalah sebanyak 202 suara. Baik pada formulir C-1 dari 8 TPS yang ada di Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellu Limpoe maupun pada Formulir DA-1 sebagai berikut di bawah ini:

kami me-refer pada bukti T-004 dan juga T-005 sebagaimana tabel berikut di bawah ini, selanjutnya dianggap dibacakan.

358. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, dianggap dibacakan.

359. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Kemudian, yang ke-3. Perolehan suara Caleg Partai Bulan Bintang Tabel 2, Nomor 3 atas nama Hasnah di tingkat TPS Desa Lembang Lohe dan seterusnya, yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut tabel berikut di bawah ini:

Selanjutnya dianggap dibacakan.

360. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

361. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Kemudian, terhadap tabel itu kami menanggapi bahwa dalil Pemohon mengenai dalil Pemohon sebagaimana selisih Pemohon di Desa Lembang Lohe sebanyak 29 suara adalah tidak benar. Sebagaimana yang kami refer terhadap yang kami akan buktikan pada T-004 dan T-005.

Kemudain, yang ke-2. Perolehan suara caleg partai hanur ... Partai Bulan Bintang Dapil II Nomor 3 atas nama Hasnah di tingkat Kabupaten Sinjai yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Untuk Sinjai Timur, perolehan suara Hasnah dan seterusnya kami Termohon menyampaikan pero ... perolehan suaranya adalah 469. kemudian, untuk Tellu Limpoe.

362. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tellu Limpoe.

363. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Tellu Limpoe itu=305 suara

364. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

305, ya.

365. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Yang totalnya ada=774 suara, Yang Mulia.

Kemudian, yang ke-3. Bahwa dalil Pemohon angka 3 halaman 6 permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Adapun pada saat Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Sinjai Timur, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara pada salinan Formulir C-1 di semua TPS Desa Pasimarannu, baik yang dimiliki oleh Panwaslu kecamatan maupun saksi yang hadir. Kami me-refer ke T-003 dan seterusnya (...)

366. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

367. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Kemudian, yang ke-4. Kesalahan penulisan huruf untuk angka 34 yang seharusnya 34 pada salinan C-1 TPS 06 Desa Mas ... Massaile Kecamatan Tellu Limpoe tidak memengaruhi perolehan suara calon (...)

368. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memengaruhi.

369. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Karena tulisan angka 34 dan seterusnya.

5. Adanya coretan karena kesalahan penulisan dari kata 16 yang seharusnya 17 pada salinan Formulir C-1 TPS 07 dan Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe tidak diperbaki dengan cara menyandingkan dan seterusnya.

370. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

371. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Kemudian, ke-6. Semua dalil Pemohon dalam permohonan a quo telah dilaporkan dan seterusnya.

372. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak usahlah itu. Petitum.

373. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Kemudian, untuk selebihnya, Yang Mulia, Nomor 9. Bahwa Termohon menyangkal setiap (...)

374. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

9 mana itu?

375. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Halaman 7, nomor 9 di atas petitum.

376. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

377. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan argumen dalil klaim dan permohonan a quo kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, katagoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

Kemudian, petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi penerima eksepsi Pemohon dalam pokok Pekara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.
3. Kemudian, menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Sinjai II yang benar adalah sebagai berikut:
 1. Sinjai Timur=469, kemudian Desa Tellu Limpoe=305. Demikian keseluruhannya=774 suara.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih

378. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saudara, namanya siapa?

379. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Imam Munandar, Yang Mulia.

380. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor?

381. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

2, Yang Mulia.

382. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 2, ya?

383. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Imam Munandar, inggih.

384. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Terima kasih.

385. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Terima kasih, Yang Mulia.

386. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada Pihak Terkait, langsung dari Bawaslu. Ada apa Pak, dengan Sinjai II ini? Langsung jelaskan saja.

387. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan kami dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan laporan dari jajaran Bawaslu Kabupaten Sinjay dan jajarannya, kami menerangkan sebagai berikut.

Terka ... terkait 1, perbedaan selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan untuk DPRD Kabupaten Sinjai Dapil II Nomor Urut 1 atas nama Sainuddin, S.Sos., sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai pada kegiatan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kabupaten Sinjai berjalan dengan lancar dan hanya ada 1 keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Gerindra terkait adanya perbedaan jumlah pemilih DPTb dan seterusnya. Ini bisa kita lihat di halaman 287, PK.27.

388. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang berkaitan dengan Pemohon, ada tidak? Bukan per (...)

389. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Yang berkaitan dengan Pemohon, kami dapat di sini sampaikan, Yang Mulia, adalah.

390. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

391. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Secara berjenjang sampai di tingkat kabupaten, tidak ada perselisihan atau dari selisih suara termasuk yang berkaitan dengan ... apa ... pokok permohonan.

392. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak ada?

393. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Enggak ada.

Yang kedua, kami juga ingin sampaikan bahwa ada di sini, yaitu adanya laporan dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh atas nama Sainuddin.

394. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sainuddin?

395. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Sainuddin, Caleg DPRD Kabupaten Sinjai Nomor Urut 1 Partai Bulan Bintang.

396. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bagaimana?

397. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Amarnya adalah (...)

398. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

399. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Bawaslu Kabupaten Sinjai menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata cara, mekanisme, dan prosedur tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundangan.

400. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sampai inkracht atau ada upaya-upaya hukum?

401. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Sampai inkracht, Yang Mulia.

402. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

403. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Final, Yang Mulia.

404. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa lagi?

405. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Yang ... saya kira cukup, Yang Mulia.

406. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, ya? Baik.

407. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Karena yang lain dianggap dibacakan ada di keterangan tertulis kami.

408. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak.
Itu, Pak Ketua.

409. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, Yang Mulia. Berarti tidak ada kaitannya dengan persoalan suara, ya? Terima kasih. Kemudian, ini Pemohon sampai saat ini juga belum menyerahkan surat rekomendasi sebagaimana kami ingatkan pada persidangan pertama, ya. Itu catatan dari kami.

Dan kemudian, untuk alat bukti. Pemohon menyampaikan Bukti P-2, P-6 sampai dengan P-8, betul? Betul, ya? Baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian, dari Termohon menyampaikan Bukti T-001 Sinjai II dan seterusnya sampai dengan Bukti T-006 Sinjai II dan seterusnya. Betul?

410. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Ya. Terima ... benar, Yang Mulia.

411. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, bukti yang disampaikan adalah Bukti PK.27.7-108 sampai dengan PK.27.7-116, benar?

412. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Persis, Yang Mulia.

413. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

KETUK PALU 1X

Baik, kita lanjut ke ... bagaimana, Bapak?

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH. SUYUTH

Terima kasih, Yang Mulia. Kami kalau bisa mendapatkan salinan eksepsi biar kami (...)

415. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Salinan dari Termohon?

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH. SUYUTH

Ya, Yang Mulia.

417. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sebenarnya bisa Bapak dapatkan ... ya, nanti bisa kami berikan di sini. Sebenarnya sudah didownload ... diupload juga, Pak, di web nya Mahkamah Konsitusi kalau mau Bapak cari di situ. Tapi, kalau mau di sini, mohon bersabar menunggu karena kan fotokopinya banyak, ya.

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH. SUYUTH

Baik, Yang Mulia.

419. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Bapak.

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH. SUYUTH

Yang kedua, Yang Mulia. Seperti tadi disampaikan dari Bawaslu Sulawesi Selatan, bahwa ini sudah bersifat inkraht, tetapi kami menyatakan belum inkraht. Karena ini masih berproses di Bawaslu.

421. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tadi, inkraht yang saya dengar.

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH. SUYUTH

Belum inkrah, Yang Mulia. Karena kami masih tetap melanjutkan ke Bawaslu Republik Indonesia dalam bentuk (...)

423. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti kalau perkara Bapak sampai ke tingkat pembuktian, buktikan itu!

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH. SUYUTH

Baik.

425. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH. SUYUTH

Cuma ini tadi ada persoalan esensial (...)

427. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya ... ya.

428. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rekomendasi, Pak. Itu harus Bapak cermati, itu.

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH. SUYUTH

Terkait dengan ... seperti disampaikan Ketua Majelis, bahwa rekomendasi (...)

430. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH. SUYUTH

Kami telah menyetor.

432. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu. Kami lihat ... saya hanya ... kami hanya lihat konkretnya nanti, Pak, ya.

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH. SUYUTH

Ya, itu ditandatangani langsung dengan Pak Yusril, Yang Mulia?

434. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu urusan internal Anda itu. Nanti, kami lihat konkretnya, barangnya ada tidak, itu saja.

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH. SUYUTH

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

436. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak.

437. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang berikutnya. Untuk Perkara Nomor 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Keadilan Sejahtera. Mohon kehadirannya!

Berkenan, Yang Mulia, Pak Dr. Wahiduddin Adams untuk memandu!

438. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua. Kita lanjutkan, tadi untuk Partai Keadilan Sejahtera dan jawaban Termohon, serta nanti keterangan Bawaslu. Tidak ada Pihak Terkaitnya, ya. Silakan!

439. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan seterusnya. Ada eksepsi menyangkut kewenangan Mahkamah.

440. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

441. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Sebagaimana didalilkan dalam jawaban di angka 7, Yang Mulia, halaman 4.

442. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

443. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon mempermasalahkan terjadinya pemilih atas nama Sudarja yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali, di TPS 002 dan TPS 004 Kecamatan Bontosikuyu. Dimana atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan meneruskan dugaan tindak pidana pemilu tersebut

kepada Penyidik Polres Kabupaten Selayar, dengan terlapor atas nama Sudarja. Berdasarkan temuan laporan 04 TML dan seterusnya.

Oleh karena demikian, terhadap adanya pokok permohonan yang demikian bukan merupakan Kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan dari lembaga pemilihan lain.

444. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Selanjutnya dalam pokok perkara!

445. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Dalam pokok perkara, langsung kepada bagian tabel tentang persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

446. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

447. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Parpol PKS perolehan suara menurut Termohon=1.183, menurut Pemohon=1.233, artinya ada selisih 50 suara. Bahwa berdasarkan tabel tersebut selisih ... bila selisih 50 suara tersebut telah memengaruhi perolehan kursi keenam atau terakhir, yaitu bila didasarkan pada perolehan suara menurut Termohon ... maaf tabel 2, Yang Mulia.

448. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

449. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Di tabel 2 disebutkan bahwa perolehan kursi menurut Termohon di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Kepulauan Selayar V untuk pengisian keanggotaan DPRD, Parpol Nomor 8 nama parpol PKS, perolehan suaranya=1.183 artinya tidak memperoleh kursi.

450. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

451. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Kemudian, kami lanjutkan tabel yang lain dianggap dibacakan.

452. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

453. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Dilanjutkan pada argumentasi di bagian terakhir.

454. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dalil kualitatifnya?

455. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya. Dalil kualitatif.

456. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Secara singkat saja.

457. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Terhadap dalil angka 1, 2, 3, berarti dianggap dibacakan, Yang Mulia.

458. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

459. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Berikutnya di halaman 7 tanggapan terhadap dalil kualitatif Pemohon, ini juga di angka 4. Kami bacakan.

Adapun terkait persoalan mengenai adanya pemilih atas nama Sudarja yang terdaftar dan telah memilih di TPS 02, namun kembali memilih di TPS 04, dengan menggunakan Undangan C-6 milik pemilih lain (atas nama Darja). Kiranya cukuplah jelas dan telah diproses oleh Bawaslu Provinsi dengan meneruskan temuan dugaan tindak pidana pemilu tersebut kepada Polres Kabupaten Selayar berdasarkan temuan, dan seterusnya.

Untuk selanjutnya, menunggu hasil pemeriksaan tindak pidana oleh instansi yang berwenang, dan kiranya menurut Termohon prosedur penanganan temuan tindak pidana tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga, karenanya secara nyata dan jelas pokok permohonan a quo bukan Kewenangan Mahkamah. Ada relevansi dengan pokok eksepsi, Yang Mulia.

460. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

461. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Kami lanjutkan pada bagian akhir, Yang Mulia, di halaman 6 ... maaf halaman 8 angka 6.

Dalam perkara a quo hanya terdapat keadaan berupa pemilih Sudarja secara tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan hak pilih dari pemilih Darja, nama pemilih lain yang memang terdaftar di TPS 004. Sehingga, pemilih atas nama Sudarja tersebut bukan termasuk kategori pemilih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2019. Oleh karenanya pula, terhadap terjadinya tindakan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang menanggapi tuntutan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan hasil berupa tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 004 dirasakan telah benar dan cukup berasal (vide Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 052/K.Bawaslu, dan seterusnya tertanggal 26 April 2019.

Selanjutnya, pada angka 9, Yang Mulia.

462. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

463. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Bahwa oleh karenanya, terhadap dalil beserta petitum Pemohon terkait peristiwa dan tuntutan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 dan TPS 004 Kecamatan Bontosikuyu, tidaklah beralasan dan patut untuk dikesampingkan. Sehingga, cukup beralasan pula bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan tersebut.

464. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

465. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Petitum.

Berdasarkan seluruh tanggapan yang telah diuraikan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Termohon dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.08, dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar V Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tabel dalam petitum.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tertanda, Kuasa Hukum Termohon.

466. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Lanjutkan keterangan Bawaslu! Enggak ada?

467. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera yang dipersoalkan satu, yang itu selisih 50 suara yang me ... memengaruhi perolehan kursi Pemohon, dan seterusnya dan adanya. Fakta bahwa ada pemilih yang

memilih dua kali, itu yang kami akan jelaskan karena itu yang kami anggap menonjol dari hasil pengawasan kami.

468. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

469. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Baik. Hasil pengawasan berjenjang di Kabupaten Selayar terha ... terkait dengan Partai Keadilan Sejahtera, hasil laporan pengawas kami tidak ada permasalahan dari sisi perolehan suara secara berjenjang. Namun, perlu kami sampaikan bahwa memang benar dari hasil pengawasan, ada dua ... ada ... ada pemilih yang memilih dua kali, yaitu atas nama Darja dan Sudarja. Pada saat itu, jajaran Panwascam Bawaslu Kabupaten Selayar itu melakukan pengkajian, penelitian karena memang begitu prosedur peraturan perundangan yang ada di kami. Tetapi, hasil kajian tidak direkomendasikan PSU karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 372 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa memilih 2 ... memilih 2 kali di TPS ... memilih 2 kali itu bukan syarat PSU, itu. Akhirnya, tetapi dia menjadi tindak pidana.

Oleh karena itu diteruskan menjadi dugaan tindak pidana yang bersangkutan. Nah, sampai berakhirnya makanya ada di kami kasih masuk di tambahan bukti, Yang Mulia. Di ... kalau tidak salah di renvoi kami. Ada sudah ... baru-baru ini, pekan lalu sudah keluar putusan dari ... dari Pengadilan Negeri Selayar kepada yang bersangkutan dan jatuh vonis. Karena memang itu diatur tindak pidana. Tetapi, untuk rekomendasi PSU di TPS 2 dan TPS 4 Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu. Itu karena dua ... karena dua-duanya terdaftar, Sudarja ini memperoleh 2 ... 2 C-6. Itu hasil dari keterangan hasil pengawasan bersama kami. Di TPS 2 ada C-6 nya, di TPS 4 juga ada C-6 nya.

470. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

471. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Jadi, dan orang yang sama. Dan NIK nya juga ... ya NIK nya juga berbeda. Hasil pengawasan kami mengatakan bahwa ya itulah bahwa dia terdaftar karena menggu ... dua-dua di 2 ... 1 orang menggunakan hak suaranya di TPS 02 dan TPS 02 Desa Polassi ini, di Kecamatan Bontosikuyu, itu kedua-duanya menggunakan Formulir C-6 dan itu resmi.

472. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

473. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Demikian, Yang Mulia, hasil (...)

474. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pada waktu di apa ... pemungutan suara di TPS 2 dan 4 Desa Polassi, Kecamatan Bonto (...)

475. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Sikuyu.

476. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sikuyu itu.

477. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Benar.

478. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu Formulir DB-1 nya PKS tidak tanda tangan? Itu Saudara menyebutkan di halaman 2 itu, Bukti PK.27.1.2.

479. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

DB Kabupaten, Yang Mulia.

480. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Tidak bersedia menandatangani? Itu di halaman 2 dari keterangan Bawaslu itu.

481. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Halaman 2?

482. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman 2, mungkin kalau ... ini halaman baru kali, ya? Karena pasti ini lembar ke berapa. Nunjuknya PK27.1 (...)

483. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Mohon maaf, Yang Mulia. Saya tidak ingat karena di keterangan kami ada beberapa (...)

484. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

485. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Di buktinya. Yang jelas dari hasil pengawasan kami (...)

486. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tadi dibacakan itu sebetulnya tadi.

487. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ya, benar di DB-1 tidak bersedia menandatangani. Baru kami temukan, Yang Mulia.

488. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

489. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

PK.27.

490. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu saja yang Saudara (...)

491. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Mengkonfirmasi.

492. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sampaikan sebagai keterangan Bawaslu? Cukup, ya? Tadi cukup katanya.

493. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Cukup, Yang Mulia.

494. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

495. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Cukup, Yang Mulia.

496. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

Ya, karena Pihak Terkait tidak ada. Kami kembalikan Pak Ketua untuk bukti dan alat buktinya.

497. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum saya ke alat bukti, untuk Bawaslu tadi Bapak menyebut pasal berapa? Pasal 372 Undang-undang Pemilih yang tidak ... bahwa kalau memilih lebih dari 2 kali tidak menjadi syarat PSU itu? Pasal berapa tadi?

498. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

372 ayat (2).

499. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ah.

500. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ayat (2). Ada beberapa kriteria di sana yang tidak ada kriteria di situ bahwa memilih 2 kali itu menjadi syarat PSU.

501. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, jadi (...)

502. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Kecuali yang tidak terdaftar. Nah, yang bersangkutan ini terdaftar.

503. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terdaftar.

504. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Hasil pemeriksaan kami menggunakan C-6, NIK-nya berbeda.

505. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tetapi itu masuk kategori ... kategori pidana?

506. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Tindak pidana pemilu. Benar.

507. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan itu sudah diputus?

508. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Sudah diputus di ... baru pekan lalu, Yang Mulia. Sebelum ... setelah keterangan ini berproses.

509. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, nanti kami ini. Baik, terima kasih.

510. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ya.

511. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya lanjutkan dengan perso ... beberapa catatan yang berkait dengan bukti. Bukti dari ini ... dari Termohon itu dari 001, Kepulauan Selayar V dan seterusnya, sampai dengan 004. Betul? Termohon?

512. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

005, Yang Mulia.

513. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

005?

514. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, dalam daftar ... bukti.

515. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, dalam catatan kami kok 004?

516. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

05 Model C-6 atas nama Darja.

517. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, kemarin ada renvoi, ya? Dari ada ... renvoi dari Termohon?

518. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, renvoi.

519. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, 005? Yang 05 nya katanya Anda renvoi jadi 04? Awalnya memang segitu, tapi direnvoi jadi 004. Gimana itu?

520. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, berarti masuk dalam kumpulan di 004, ya?

521. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ah, ya itu.

522. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Baik, kalau begitu.

523. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ah, itu sudah ... ini ada ... ada buktinya di sini. Jadi, benar ya 004?

524. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, baik. Ya, Yang Mulia.

525. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau 008 Saras nanti jadi itu, itu ya. Baik, jadi itu yang kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Pada bukti ... ada ... ada ... ya itu di ini nya. Untuk Bawaslu catatan kami begini, Bawaslu itu di alat bukti PK.12 ... 27.1-4 itu buktinya benar tetapi isinya itu terpotong, Pak. Nanti diperbaiki, ya.

526. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Siap, Yang Mulia.

527. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Itu di ... terpotong ... apa ... apa namanya ... putusan acara cepat pelanggaran administratif atas nama Andi Cawang itu.

528. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ya.

529. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu terpotong. Begitu juga yang Bukti PK.27.1.6, itu terpotong juga.

530. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ya.

531. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Biarlah pajak saja yang potong-potong, Pak, jangan buktinya juga ikut dipotong kan, ya. Ya, itu.

532. BAWASLU SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Terima kasih, Yang Mulia.

533. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terus yang selebihnya itu su ... dapat kami sahkan. Baik, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Pemohon, kami mau konfirmasi, bu ... Anda menyerahkan Bukti PA sampai dengan PD-4, ya? Pemohon, betul, ya? Baik, terima kasih. Sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Kita lanjutkan dengan perkara berikutnya, Nomor 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Golongan Karya. Mohon berkenan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

534. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Ya, Pak Ketua, terima kasih.

Jadi tadi ada penarikan dari atas nama Pak Halid, ya? Abdul Kadir. Tapi kalau masih mau direspon, ya, buang-buang energi juga Termohon. Tapi intinya begini, sebelum ke pokok permohonan, ada renvoi?

535. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Renvoi nanti sambil jalan saja.

536. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya. Kalau begitu eksepsi saya (...)

537. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Sedikit saja.

538. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sampaikan dulu, Anda menyampaikan pendahuluan itu kan karena ketidakhadiran Rismayani dan Muhammad Yasir, Anda minta digugurkan, ya?

539. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Betul, Yang Mulia. Sesuai Pasal 38/PMK Nomor 2, Yang Mulia.

540. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Nanti dipertimbangkan Mahkamah.

541. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Ya.

542. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian mengenai ekspesi, Pak. Kedudukan hukum untuk Yasir dan permohonan yang berkaitan dengan sengketa internal, tidak dilampiri rekomendasi dari ketua umum dan sekjen (...)

543. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Betul.

544. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sehingga tidak punya legal standing.

545. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Betul, Yang Mulia.

546. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian eksepsi yang mengenai Arfandi Idris juga tidak ada rekomendasi.

547. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Betul, Yang Mulia.

548. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian yang Kadir Halid memang sudah ditarik sehingga tidak relevan lagi kita bahas di sini.

549. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Betul, Yang Mulia.

550. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian Arifin Daeng, juga mengenai rekomendasi, ya?

551. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Betul, Yang Mulia.

552. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kalau begitu langsung jawaban pokok perkara, Pak.

553. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Baik, Yang Mulia.

Untuk jawaban pokok perkara, untuk jawaban ... Muhammad Yasir, Rismayani, dan sepanjang Dapil I Sulawesi Selatan, Makassar atas nama Kadir Halid, karena sudah ditarik maka kami anggap dibacakan saja, Yang Mulia.

554. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Oke. Ya.

555. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Langsung ke poin C di halaman 19. Permohonan atas nama Ir. M. Arfandy Idris untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan IV, Yang Mulia.

556. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

557. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Jadi permohonan ini tidak menyangkut permohonan sengketa hasil pemilihan, Yang Mulia. Akan tetapi menyangkut proses pencalonan Caleg Partai Golkar yang lain, atas nama H. Ince Langke. Dimana Pemohon mendalilkan bahwa Caleg atas nama Ince Langke ini dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari Patel ... Partai Golkar dan/atau telah berpindah ke Partai Nasdem. Sehingga keanggotaannya dianggap tidak sah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Yang Mulia, Termohon menyatakan bahwa Caleg atas nama H. Ince Langke ini adalah calon anggota legislatif yang secara sah diajukan oleh Partai Golongan Karya.

558. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

559. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Dan juga pada waktu diadakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi, itu (...)

560. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Intinya menurut Termohon (...)

561. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Memenuhi syarat, Yang Mulia.

562. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

563. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Sampai dengan saat ini, tidak ada penarikan atau pembatalan dari Partai Golkar untuk Caleg atas nama Ince Langke. Begitu juga tidak ada putusan Bawaslu atau putusan pengadilan yang menyatakan membatalkan H. Ince Langke sebagai Caleg dari Partai Golkar dan/atau menyatakan bahwa pencalegannya tersebut tidak memenuhi syarat. Jadi sampai saat ini, Termohon menganggap bahwa H. Ince Langke adalah (...)

564. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masih caleg yang memenuhi syarat, gitu?

565. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Memenuhi syarat, Yang Mulia.

566. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Ini yang ... kemudian yang Kadir Halid, sudah tidak relevan. Tidak perlu lagi (...)

567. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Terus untuk Kadir Halid. Karena sudah ditarik, maka kami anggap tidak relevan (...)

568. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Langsung halaman berapa? 27?

569. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Langsung ke halaman 27, Yang Mulia.

570. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

571. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Ada renvoi di angka 40, baris ke 4. Di TPS 9 menjadi TPS 20, Yang Mulia.

572. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

20. Hanura di TPS 20, ya?

573. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Seharusnya, total adalah bukan 9 suara, tapi 6 suara, Yang Mulia.

574. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

6 suara.

575. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Ya.

576. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan 26?

577. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Seharusnya adalah total 6 suara (...)

578. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

"Bukan 26" nya tetap?

579. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

"bukan 26" nya tetap. 9 itu diganti 6, Yang Mulia.

Untuk Pemohon Partai Politik Golkar, untuk mengisi anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan II. Jadi dalil Pemohon ini hanya terbatas pada TPS 20, tentang perolehan suara partai hanura yang menurut Pemohon ada penggelembungan sebanyak 20 suara. Dimana menurut Pemohon harusnya suara Partai Hanura di TPS 20 Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang itu hanya 6 suara, bukan 26 suara.

580. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

581. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Atas dalil tersebut, Termohon menolak dalil dari Pemohon.

Kami sampaikan tabel perolehan suara Partai Hanura beserta caleg-calegnya di TPS 20 Kelurahan atau Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, sebagaimana dalam tabel 20 ... halaman 28, Yang Mulia.

582. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik

583. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Dimana total suara partai dan caleg untuk Partai Hanura adalah 26.

584. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

585. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya temuan pengerua ... pengurangan atau penggelembungan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum.

586. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

587. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Berikutnya untuk Pemohon atas nama Ir. Arifin Daeng Marola, halaman 29.

588. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya

589. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Selayar Dapil II. Pada prinsipnya, Ir. Arifin Daeng Marola, mempermasalahkan adanya sel ... perbedaan perolehan suara menurut Pemohon di TPS 01 dan TPS 02 Desa Bontonasaluk, Kecamatan Bontomantene, kemudian di des ... TPS 03 Desa Bonea Makmur, TPS 01 Desa Mare Mare Kecamatan Bontomanai, ada di 4 TPS tersebut, Yang Mulia.

590. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

591. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Pada prinsipnya kami menolak dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas. Kami sajikan perolehan suara

dalam tabel di angka 44 untuk TPS 01 dan TPS 02 Desa Bontonasaluk, kami anggap dibacakan.

592. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya

593. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Terus untuk di dalil angka 46 di halaman 30 untuk TPS 03 Desa Bonea Makmur dan TPS 01 Desa Mare Mare (...)

594. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan?

595. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Tabel kami anggap dibacakan dan untuk persandingan data perolehan suara Pemohon, yaitu Ir. Arifin Daeng Marola dengan caleg lain yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu H. Syamsurrijal Rahim untuk perolehan suaranya di 3 kecamatan, Kecamatan Bontomanae, Kecamatan Buki dan Kecamatan Bontomantene adalah sebagaimana dalam tabel halaman 30 angka 47, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

596. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya

597. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Dengan demikian, dalil Pemohon tentang terjadinya penambahan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 atas nama H. Syamsurrijal Rahim sebanyak 10 suara di TPS 03 Desa Bonea Makmur dan 10 suara di TPS 01 Desa Mare Mare, Kecamatan Bontomantane sebagaimana tuduhan Pemohon adalah tidak berdasar secara hukum. Karenanya, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana pem ... penambahan yang dimaksud oleh Pemohon, begitu juga dengan ad ... dalil adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 01 dan TPS 02 Desa Bontonasaluk adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum.

Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon mengenai ... mengadai ... mengenai adanya temuan pengurangan suara atau penggelembungan

suara yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Petitum, Yang Mulia, halaman 32. Dalam eksepsi,

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Indonesia Nomor 987/PL.01.8/Kpt/06/KPU/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam pemilihan umum tahun 2019.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Kantor Ali Nurdin and Partners. Terima kasih, Yang Mulia.

598. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait? Silakan!

599. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ARWINSYAH

Ya, Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb.

600. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam. wr. wb.

601. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ARWINSYAH

Terima kasih, Majelis. Kami dari Pihak Terkait perkara 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golkar Sulsel. Sebelumnya kami ingin menyampaikan, Yang Mulia, oleh karena terkait perkara 66, khususnya Daerah Pemilihan (...)

602. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

603. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ARWINSYAH

Siap, khususnya Daerah Pemilihan Sulsel I atau Makassar A telah dicabut, maka mohon izin jika diperkenankan, kami ingin meminta salinan pencabutan?

604. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti di kopikan

605. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ARWINSYAH

Siap, terus yang kedua, Yang Mulia, Majelis. Terkait dengan keterangan tertulis khusus Dapil Sulsel I tidak akan kami bacakan (...)

606. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah engga relevan.

607. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ARWINSYAH

Karena kami anggap tidak relevan lagi untuk kami tanggapi. Tetapi untuk Dapil Sulsel IV, itu akan dibacakan oleh rekan kami.

608. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan!

609. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait dalam Perkara 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Untuk Daerah Pemilihan IV Sulsel. Keterangan Pihak Terkait yang akan kami sampaikan ini, kami bagi dalam 2 bagian, yang pertama dalam eksepsi dan yang kedua dalam pokok permohonan. Dalam eksepsi (...)

610. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ini eksepsinya kan mengenai bukan wewenang, ya?

611. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Betul, Majelis.

612. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena ini (...)

613. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Ada dua, ya (...)

614. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

MK tidak berwenang menangani perkara proses gitu kan?

615. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Ya, Majelis.

616. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, dianggap dibacakan.

617. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Kemudian, eksepsi yang kedua (...)

618. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Obscur, mengenai apa?

619. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Bahwa permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan hasil penghitungan menurut Pemohon, itu intinya, Yang Mulia.

620. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, yang tidak diuraikan dalam petitum dan posita. Oke.

621. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Ya.

622. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung pokok permohonan.

623. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Kami langsung ke (...)

624. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang dapil saja yang dipersolakan tadi yang 1 sudah dianggap (...)

625. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Ya, Yang Mulia.

626. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak relevan, kan.

627. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Khusus Dapil IV.

628. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Halaman berapa, Pak? Atau sudah punya rangkuman?

629. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Ada rangkuman, yang saya bacakan.

630. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, silakan! Oke

631. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Bahwa dalam permohonan Pemohon menyampaikan 2 hal yang pertama tentang kean ... persoalan keanggotaan H. Ince Langke, S.Pd., di Partai Golkar. Tanggapan kami terhadap dalil permohonan tersebut adalah bahwa H. Ince Langke, S.Pd., adalah Anggota Partai Golkar yang sah, bahwa pemberian kengggotaan ... keanggotaan H. Ince Langke. S.Pd., di Partai Golkar telah sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai Golkar.

Bahwa H. Ince Langke bukan ... bukan hanya sebagai Anggota Partai Golkar. Tetapi berdasarkan keputusan dewan pimpinan part ... Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar telah pula di ... telah pula dipercaya menjadi Pengurus Partai Golkar Sulawesi Selatan.

632. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, lebih dari anggota.

633. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Lebih dari anggota. Tentang (...)

634. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Intinya Anda akan membantah bahwa persyaratan tetap memenuhi dan sah, gitu kan?

635. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Betul, Majelis.

636. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa lagi yang mau disampaikan?

637. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Intinya itu, bahwa H. Ince Langke adalah Anggota Partai Golkar yang sah.

638. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah.

639. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Selanjutnya tentang permohonan Pemohon menyangkut yang menyatakan bahwa H. Ince Langke tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

640. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah itu, pengulangan tadi.
Sudah kaitan dengan tadi, Pak.

641. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Ya.

642. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mungkin ada yang baru yang disampaikan.

643. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Jadi, sebagai penjelasan, Majelis.

644. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

645. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Pemohon ini berdasarkan bukti yang kami ajukan adalah bukti PTSS.4-16 adalah anggota tim seleksi di internal Partai Golkar.

646. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi yang ingin Mahkamah dapat pandangan Anda tentang dia sudah pindah partai itu gimana?

647. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Pindah partai itu di 2000 ... kan begini, Majelis. 2012 memang ada pemberhentian dari partai Golkar.

648. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sepanjang yang berkaitan bahwa dia masih anggota partai itu firm klir itu?

649. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Klir, sekarang.

650. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah dijelaskan KPU juga?

651. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Betul. Betul, sudah.

652. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang lain tadi yang didalilkan Pemohon bahwa dia sudah pindah partai bagaimana?

653. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Tahun 2016 pindah ... masuk menjadi parta ... Anggota Partai Nasdem tetapi kemudian di 2017 H. Ince Langke keluar dari Partai Nasdem dan kemudian pindah ke partai Golkar. Jadi, seperti itu, Yang Mulia.

654. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sampai proses pencalegan itu, ya?

655. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Pada saat pencalekan H. Ince Langke adalah Anggota Partai Golkar.

656. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke kalau dal ... dengan demikian apa yang Bapak minta? Sebagai (...)

657. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Dengan demikian dalam petitem.

Berdasarkan uraian bagaimana terebus ... tersebut diatas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sela dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara a quo.
3. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan telah benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya kami anggap dibacakan. Sepanjang untuk pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV atas nama H. Ince Langke, S.Pd.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon untuk Partai Golkar dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV telah

benar sebagai berikut: Ir. H ... Ir. M. Arfan Idris (Pemohon) memperoleh suara=9.117, sedangkan H. Ince Langke I. A. S,Pd Pihak Terkait memperoleh suara=9.957 suara. Perolehan suara anggota an ... calon yang lain kami anggap dibacakan.

658. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

659. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

660. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, terima kasih. Masih ada untuk Pihak Terkait?

Baik, Bawaslu coba ditengahi masalahnya apa ini? Langsung tembak saja tentang H. Langke ini. Enggak usah berpanjang-lebar, Bapak.

661. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AMRIYADI

Baik, terima kasih, Majelis. Terkait dengan persyaratan Ince Langke selama dalam proses pengawasan baik di KPU Selayar dan pencalonan yang di KPU provinsi, kami tidak pernah menerima temuan ... apa ... menemukan dan menerima temuan dugaan pelanggaran terkait dalam pencalonan Ince Langke.

662. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pernah ada keberatan enggak pada waktu proses penetapan dulu atau dari Pihak Pemohon.

663. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AMRIYADI

Kami mengikuti proses dan dituangkan dalam Form A Pengawasan, kami tidak pernah menemukan dan mendapatkan laporan.

664. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Laporan. Apa lagi yang dijelaskan, Pak?

665. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AMRIYADI

Yang ke-2, terkait dengan dugaan pemasluan dan pengelembungan suara pada Form C-1 DPRD Provinsi di Kabupaten Selayar. Dugaan tidak adanya penempelan pengumuman C-1 dalam Form A Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Selayar hasil penghitungan suara model C-1 telah diumumkan dan ditempel di lingkungan TPS yang mudah diakses. Kemudian, keterangan atas dugaan jenis tulisan tinta dan seterusnya. Selama dalam proses rekapitulasi secara berjenjang tidak pernah ada keberatan dari saksi Partai Golkar maupun tidak ada laporan serta temuan dugaan pelanggaran terkait dengan tulisan tinta yang sama pada salinan C-1.

666. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

667. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AMRIYADI

Yang selanjutnya (...)

668. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang di beberapa kecamatan yang di dalil ... yang disampaikan bantahan Termohon, di mana Pak? Termohon tadi kan mem ...

669. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AMRIYADI

Ya.

670. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termohon tadi kan sudah membantah.

671. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AMRIYADI

Kecamatan Bantaeng, Buki, Bonto Manae.

672. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, 3 Kecamatan.

673. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AMRIYADI

Bonto ... dan seterusnya.

Selanjutnya, keterangan atas dugaan adanya C-1 yang ditandatangani lengkap. Namun, isi kop masih belum terisi, sehingga terindikasi adanya upaya sistematis untuk memalsukan surat suara sama halnya dengan proses pengawasan yang dilakukan secara berjenjang tidak pernah ada keberatan, baik dari saksi Partai Golkar maupun saksi partai lain, dan tidak ada pula laporan terkait hal tersebut.

Kemudian selanjutnya, perolehan suara Calon Anggota DPRD Dapil I Makassar Partai Golkar. Dugaan TSM yang dilakukan oleh Andi Debbie Purnama. Bahwa tindak lanjut atas laporan Bawaslu me ... apa ... menerima laporan. Kemudian, tindak lanjut akhir adalah selanjutnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yaitu penerusan pelanggaran tindak pidana pemilu kepada Kapolrestabes Makassar.

674. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang lain ada sifatnya yang khusus Pak, ada tidak?

675. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AMRIYADI

Ya. Untuk Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan.

676. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang tidak terjadi apa-apa enggak usah diceritakan, Pak.

677. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AMRIYADI

Kemudian untuk Pangkajene Kepulauan, selama ... khusus untuk TPS 9 Kelurahan atau Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang tidak pernah menerima laporan dan juga tidak ada temuan dugaan pelanggaran secara berjenjang ditemukan.

678. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

679. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AMRIYADI

Saya kira itu.

680. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu saja, Pak, ya. Baik, terima kasih.

681. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

682. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Masih ada (ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia. Mengenai Selayar.

683. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Selayar ... Selayar belum ya?

684. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Selayar yang Arifin Daeng Marola Caleg DPRD yang terakhir tadi kami ingin menerangkan.

685. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Arifin Daeng Marola?

686. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ari ... benar, persis, Yang Mulia.

687. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang 6 suara itu?

688. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Benar, Yang Mulia.

689. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, bagaimana, Pak?

690. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Baik, jadi, dari sisi perolehan suara dari hasil pengawasan-pengawasan kami secara berjenjang. Baik yang di ... berkaitan dengan pokok yang didalilkan ataupun yang tidak berkaitan secara langsung, dari sisi perolehan hasil itu tidak kami... keterangan kami sudah ada di sana. Bahwa walaupun ada koreksi dalam prosesnya tapi sudah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk ketika ada

kesalahan-kesalahan telah terkoreksi secara berjenjang pada rekap perolehan hasil secara berjenjang di ... yang terkait dengan perolehan Partai Golkar.

Nah, yang kami juga sampaikan di sini bahwa pelap ... bahwa Ir. Arifin Daeng Marola juga melapo ... pernah memberi ... mengajukan laporan, menyampaikan laporan ke Bawaslu ... ke Bawaslu dan seterusnya.

691. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada apa? Putusan Bawaslu?

692. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Keputusan Bawaslu, yaitu tidak terbukti dan itu juga sudah dikuatkan dari hasil Putusan Koreksi Bawaslu RI memutuskan Putusan Bawaslu Kabupaten Selayar.

693. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

694. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon terkait dengan yang didalilkan oleh yang berkaitan dengan Caleg Arifin Daeng Marola. Demikian, Yang Mulia.

695. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak. Bapak dari Selayar, ya? KPU kabupaten sana? Apa Provinsi?

696. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Saya Bawaslu Provinsi.

697. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Pak.

698. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Terima kasih.

699. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebenarnya kan bisa diajak ramai-ramai untuk datang tiap-tiap Ketua KPU. Baik, Pak, terima kasih.

700. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Izin, Yang Mulia. Termohon, Yang Mulia.

701. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termohon? Ya, apa? Pak?

702. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Renvoi kami tadi terbalik, Yang Mulia. Untuk di halaman 27 angka 40. TPS nya itu yang betul TPS 9 bukan TPS 20, Yang Mulia. Tadi kami justru terbalik, TPS 9 direnvoi jadi TPS 20.

703. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

TPS? Halaman berapa, Pak?

704. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

27, Yang Mulia. Poin 40. Di situ tertulis TPS 20, TPS 20, maksud ... yang betul adalah TPS 9. Perbedaan suaranya yang 20, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

705. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar saya ... halaman?

706. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

27, poin 40. Untuk Pangkajane Kepulauan II.

707. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

27, sebentar, Pak.
TPS yang benar TPS?

708. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Terjadi ... kami bacakan saja, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon mendalilkan penambahan suara Partai Hanura sebanyak 20 suara, terjadi di TPS 20, direnvoi jadi TPS 9.

709. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah benar dong?

710. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Yang atas, Yang Mulia. Dimana menurut Pemohon suara Partai Hanura di TPS 9 tersebut tetap.

711. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya, ya.

712. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Seharusnya adalah 6. Bara Batu. Ya.

713. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

714. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Terus ada lagi di bawah, TPS 20 sudah betul ... eh ... menjadi TPS 9.

715. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

TPS 9.

716. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

TPS 20

717. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kembali ke 9?

718. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Kembali ke 9. Di tabel juga, Yang Mulia, TPS 20 direnvoi menjadi TPS 9. Di atasnya tabel 2 ... 2 baris dari atas tabel, TPS 20 direnvoi jadi TPS 9.

719. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di tabel yang mana itu?

720. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Halaman 27 judulnya.

721. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar!

722. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Selisih suaranya yang 20 menurut Pemohon, Yang Mulia.

723. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Oh, ya.

724. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

TPS-nya 9.

725. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Judulnya, ya?

726. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Betul.

727. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apalagi, Pak?

728. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Terima kasih, itu saja, Yang Mulia.

729. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Itu, Pak Ketua! Terima kasih.

730. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Soal ini, bukti yang dari Termohon, Bukti T-005-nya itu belum dileges, ya. Kemudian yang bisa kami sah ... apa namanya ... jadi itu yang bisa kami sahkan adalah di luar T-005 itu. Anda serahkan dari T-001 Sulsel II Golkar, dan seterusnya sampai T-031, ya kan? Betul? T-001 sampai dengan ... T-001 sampai dengan T-031 untuk Sulsel.

731. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Betul, Yang Mulia.

732. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang T-005 nya itu, dileges dulu ya!

733. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Belum dileges T-005, Yang Mulia?

734. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, betul. Itu saja satu. Yang lainnya tidak ada persoalan.

KETUK PALU 1X

Untuk Pihak Terkait, ini Pak Ahmad Wakil masih jadi Kuasa, ndak?

735. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ARWINSYAH

Sudah tidak, Yang Mulia.

736. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah tidak? Berarti (...)

737. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ARWINSYAH

Di ... di Kuasa pun tidak tanda tangan, Yang Mulia.

738. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu maksudnya.

739. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ARWINSYAH

Siap.

740. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya ... saya mau tanya itu, karena di Kuasa tidak tanda tangan, jadi ndak ada lagi, ya?

741. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ARWINSYAH

Enggak ada, Yang Mulia.

742. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Ahmad Wakil. Jadi, cukup Anda yang menjadi wakil?

Ya, ya. Oke, terima kasih.

Baik. Ya, bukti dari Pihak Terkait untuk Dapil Sulawesi Selatan IV dari PTSS4.1 sampai dengan PTSS4.23?

743. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Betul, Yang Mulia.

744. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul? Eh, Pihak Terkait? Ya, betul?

745. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Ya. Pihak Terkait.

746. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya. Oh, Bapak di belakang, saya ndak lihat, ya. Berdiri juga boleh, Pak, ya.

KETUK PALU 1X

Dan yang untuk Provinsi Dapil Sulawesi Selatan I, Bukti PT-1 sampai dengan PT-7? Ya, betul?

747. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUH RIZAL RUSTAM

Betul, Yang Mulia.

748. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, betul itu. Kalau mengganggu ndak direkam Pak, di anunya. Kemudian untuk Bawaslu, ini catatannya begini, Pak. Bawaslu itu catatan untuk nom ... Nomor Bukti PK-27.321 itu, itu beda itu apanya ... nomor laporannya dengan yang ada di daftar bukti, ya. Nanti diperbaiki, Pak, ya?

749. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Baik, Yang Mulia.

750. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian yang tidak sesuai antara fisiknya dengan ... dengan daftarnya yang PK-27.2265 itu juga nomornya, ya. Ada nomor disebut di

daftar itu nomor 61, tapi di alat buktinya 034, nanti di ... disesuaikan. Mungkin, yang di daftar yang salah mungkin penginputannya.

751. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Baik, Yang Mulia. Ada di renvoinya, Yang Mulia.

752. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya. Nanti direnvoi saja. Kemudian, ini ada yang bukti yang tidak bisa dibaca karena terlalu kecil sekali ini, Pak. Saya sudah pakai kaca mata, enggak bisa juga itu. Bukti Nomor 27.196, itu enggak bisa dibaca, ya.

Jadi, yang bisa kami sahkan itu dari bukti yang Anda serahkan, dari angka 1 sampai dengan 102, kan?

753. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Baik. Persis, Yang Mulia.

754. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu, ya. Jadi, yang di luar yang kami berikan catatan tadi itu, sudah bisa kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Pemohon, kami mau konfirmasi saja karena sudah lengkap, dileges juga. Anda menyerahkan Bukti P-19A, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-35, dan Bukti P-38, betul?

755. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. ALIYAS ISMAIL

Betul, Yang Mulia.

756. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Ini sudah bisa disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, kita lanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya.

757. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Izin, Yang Mulia.

758. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang mana ini lagi?

759. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Termohon.

760. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kenapa ini Termohon rewel sekali ini?

761. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Kami mau menyampaikan.

762. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa?

763. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Alat bukti tambahan, Yang Mulia.

764. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya. Itu nanti.

765. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Apakah di sini atau langsung dibawa?

766. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti, nanti, langsung saja.

767. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Di bawah, Yang Mulia?

768. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, di bawah langsung, terus pengkodeannya juga ya, Pak ya!

769. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Baik, Yang Mulia.

770. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekalian dengan kuping-kupingnya itu, biar mudah dicari.

771. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Ya. Sudah, Yang Mulia.

772. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Anda kan masih punya anu ... kalau Pemohon, baru sudah ndak ada waktu untuk menyampaikan lagi ini.

773. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Baik.

774. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kecuali nanti kalau ada yang masuk sampai ke pembuktian, lain lagi ceritanya itu.

Baik, kita akan lanjutkan pemeriksaan perkara berikutnya, yaitu dari Demokrat Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Mohon kesedian Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu!

775. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Untuk Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya nanti ada Termohonnya, kemudian Pihak Terkait, dan Bawaslu. Silakan dari Termohon!

776. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik, Yang Mulia. Kami akan ... menjawab pokok-pokok jawaban dalam Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Partai Demokrat untuk Provinsi Sulawesi Selatan.

Yang Mulia, perlu dipertegas bahwa pada sidang pendahuluan tanggal 10 Juli, ini Pemohon menghilangkan atas nama Frederik untuk DPR-RI, kemudian Luwu Timur II, sama Gowa. Ini sudah ada kita tidak bacakan tapi tetap ada di jawaban atau seperti apa, Yang Mulia?

777. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

778. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana? Maksud Anda gimana?

779. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Maksud saya, jawaban saya tetap mencantumkan itu. Tapi, mungkin dianggap dibacakan.

780. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya karena kalau sudah ini ... kalau dia sudah ini kan tidak ... tidak ada relevansinya.

781. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, siap.

782. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi karena jawaban Anda sebelumnya, itu sudah ada kan itu tidak perlu di apa-apakan.

783. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, baik.

784. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, dianggap dibacakan saja.

785. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Berarti hanya untuk 1. Yaitu untuk Bahrum Daido, Yang Mulia.

Nah, dalam eksepsi, Yang Mulia. Bahwa dalam petitumnya ini, keputusan Termohon berkaitan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang memenangkan Muhammad Dhevy Bijak Caleg Partai Demokrat, Nomor Urut 7. Sehingga tidak ada ... sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mewakili ... dalam memeriksa perkara ini.

Nah, kemudian permohonan Pemohon ini tidak jelas. Cenderung rancu, apakah permohonan tersebut merupakan permohonan yang diajukan oleh partai politik atau kah permohonan yang diajukan oleh perseorangan.

786. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini dalam eksepsi, ya?

787. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya. Baik, Yang Mulia.

Kemudian, kita masuk pada halaman ... halaman 6, Yang Mulia.

788. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

789. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Nah, halaman halaman (...)

790. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dapil Sulawesi Selatan III?

791. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, Sulawesi Selatan halaman 6 ini, Yang Mulia. Dari tabel terus kita untuk poin 3. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Bahrum Daido berjumlah 2000 ... 21.836 suara. Dan Caleg Nomor Urut 3 atas nama Frederik Batti Sorring berjumlah 936 suara.

792. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

793. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Serta Caleg Nomor 7 atas nama Muhammad Dhevy Bijak berjumlah 23.870. Ini merupakan suara tidak benar, Yang Mulia.

794. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

795. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kami menegaskan suara yang benar untuk Kabupaten Luwu, itu adalah untuk Bahrum Daido itu adalah 14.897. Kemudian, untuk Caleg Nomor Urut 2 atas nama Frederik Batti Sorring itu=963.

796. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

963 atau 936?

797. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

963, Yang Mulia.

798. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kan di tabel itu 936, ya?

799. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, Yang Mulia.

800. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, jadi 963.

801. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya.

Kemudian, untuk Nomor Urut 7 ini, nama ... untuk nama Muhammad Dhevy Bijak adalah=4085.

802. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

803. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

40.000.

Nah, kemudian ... semua tabel ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

804. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

805. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kami akan langsung untuk dalil bantahan kami.

806. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di halaman?

807. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Di halaman 11, Yang Mulia.

808. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

11, ya?

809. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya.

Di halaman 11, untuk Kabupaten Luwu yang dimaksud ... untuk Dapil Sulses III adalah TPS 1, TPS 2, TPS 4, Kelurahan Walenrang, Kecamatan Walenrang adalah tidak benar. TPS 4, TPS 8, TPS 3, TPS 7, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang adalah tidak benar. Kemudian, untuk TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 2, Desa Bulu, Kecamatan Walenrang adalah tidak benar. Kemudian, TPS 2 Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang adalah tidak benar. Kemudian, untuk TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, Desa Ilanbatu, Kecamatan Walenrang Barat adalah tidak benar. Kemudian, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 7, TPS 13, TPS 12, TPS 10, TPS 9, Desa Ilanbatu Uru, Kecamatan Walenrang Barat adalah tidak benar. Kemudian, TPS 4, TPS 5, TPS 3, TPS 1, TPS 2, Desa Lamasi Hulu, Kecamatan Walenrang Barat adalah tidak benar. Kemudian, TPS 05, TPS 04, TPS 01, Desa Lempe Pasang, Kecamatan Walenrang Barat adalah tidak benar, dan TPS 4, Desa Lewandi, Kecamatan Walenrang Barat adalah tidak benar.

Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Bahrum Daido, berjumlah 21.836. Suara Caleg Nomor Urut 3 atas nama Frederik Batti Sorring, berjumlah 936 suara.

810. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

811. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Serta Caleg Nomor 7 atas nama Muhammad Dhevy Bijak, berjumlah 23.870. Ini merupakan suara yang tidak benar. Yang benar adalah sudah kami sampaikan di awal tadi, Yang Mulia.

812. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

813. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Mohon izin, langsung ke petitum, Yang Mulia.

814. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

815. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Petit ... berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Menerima eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 987 dan seterusnya.

816. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

817. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

818. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Selanjutnya ke Pihak Terkait, ya? Untuk atas nama Muhammad Dhevy Bijak, ya? Ya, silakan!

819. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUCH. ALFARISI

Ya, terima kasih, Majelis.

Saya juga sebelum membacakan poin-poin dari keterangan Terkait, juga Pemohon dalam perkara ini perkara internal antara sesama Partai Demokrat.

820. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Dimana yang dibacakan Permohonannya cuma Dr. Bahrum Daido Nomor 2. Sementara Batti Sorring ... Ir. Batti Sorring perolehan suara kedua terbesar 36.000 itu tidak dibacakan Permohonannya. Jadi ... tetapi, namun demikian tetap kami tanggap dalam permohonan ini dan dianggap dibacakan. Saya langsung saja, Majelis. Dalam permohonan kami ini pada prinsipnya ada poin eksepsi. Kewenangan Mahkamah normatif, dianggap dibacakan, kemudian legal standing juga dianggap dibacakan, saya masuk saja kepada pokok permohonan.

Pada prinsipnya, seluruh eksepsi ini dianggap dibacakan. Saya masuk pada pokok-pokok permohonan. Yang pertama bahwa keterangan Pihak Terkait mengenai rekapitulasi hasil perhitungan suara bahwa benar rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, lalu kemudian menetapkan suara Pihak Terkait berdasarkan SK KPU Nomor 987, dan seterusnya, yang dilakukan oleh KPU itu sudah benar dan tepat. Kemudian yang kedua, di ... ada keterangan Pihak Terkait mengenai rekapitulasi perhitungan suara di tingkat nasional, itu juga pada halaman 11 ada tabel di sini, Majelis. Untuk perolehan suara Partai Demokrat Dapil Sulsel III, untuk pengisian anggota DPR RI itu Partai Demokrat untuk suara partai 7.649, untuk Nomor 1, Ir. H. Timo Pangerang itu 26.000, Ir. Bahrum Daido itu ... Pemohon itu 31.127, Drs. Frederik Sorring yang tadi tidak dibacakan permohonannya (...)

822. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Itu 36.000, kemudian Pemohon, saya langsung ke Pe ... Terkait itu 45.790. Jadi suara Partai Demokrat untuk seluruh Dapil Sulsel I ... Sulses III itu berjumlah 172.946. Lalu kemudian, saya langsung masuk kepada dalil-dalil Permohonan Pemohon itu rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang terkhusus di daerah yang ... di ... digugat di sini, yaitu di ... khusus di Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu itu tidak ada masalah. Rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan mulai C-1 DPR RI, DAA-1 DPR, DA-1 DPR, DB-1 dis ... di 9 kecamatan akhirnya sampai ke DC-1 juga Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian penetapan rekapitulasi 987 itu sama sekali tidak ada keberatan. Tidak ada laporan dan tidak ada apa ... justru Pihak Terkait mengajukan semua bukti-bukti itu bahwa di seluruh Dapil Sulsel III, 8 ... 9 kabupaten, kemudian itu tidak ada permasalahan terkait dengan angka-angka itu, tetap pada rekapitulasi hasil perhitungan yang dilakukan. Dan ini sudah dilakukan secara berjenjang, jadi mulai C-1 di seluruh DPR ... apa namanya ... Dapil Sulsel III, DB-1 9 kabupaten kami ajukan bukti juga, kemudian DC-1 untuk rekapitulasi dan itu sama sekali tidak ada keberatan. Jadi, prosedur pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang oleh penyelenggara mulai dari tingkat KPPS, PPK, KPUD, kemudian provinsi, sampai di tingkat nasional itu sama sekali tidak masalah. Yang sudah luber jurdil sesuai ketentuan UNDANG-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20D ayat (1). Itu yang inti-inti, Majelis.

Kami masuk kepada pokok-pokok permohonan. Yang pertama, dalam petitum, eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohona Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon keberatan dan permoho ... Pemohon dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa keputusan Termohon dalam hasil rekapitulasi perhitungan suara secara nasional berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.018KPT tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2019 dan Berita Acara Nomor 135PL.01BA/06KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 adalah sah, benar, sudah benar, sah, dan berlaku.

3. Dianggap dibacakan. Kemudian atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Tertanda tangan, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Majelis.

824. ANGGOTA HAKIM: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Lanjut (...)

825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Izin, Majelis, saya lupa. Saya akan ajukan di surat advokat, surat kantor ... a ... apa ... kartu advokat. Sekaligus softcopy jawaban dan daftar bukti. Terima kasih, Majelis.

826. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Setelah sidang, ya. Ya, ya, ya. Baik. Lanjut ke keterangan Bawaslu!

827. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami menerangkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya terkait dengan pokok permohonan Partai Nomo ... Demokrat. Jadi kesimpulan kami, mohon izin, Yang Mulia karena ini berkaitan dengan perolehan suara di Dapil III ... sul ... Dapil III ... Sulawesi Dapil III untuk DPR Pusat yang:

Meliputi beberapa kabupaten, yaitu Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Pinrang, Enrekang, Sidrap, Toraja, Toraja Utara. Nah, hasil pengawasan ... pengawasan kami secara berjenjang, mulai PTPS, PPS, panwascam, Bawaslu kabupaten/kota terkait dengan Dapil III tersebut itu telah dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi hal yang lain dari keterangan kami, dianggap dibacakan.

Ya, termasuk juga yang berkaitan dengan yang didalilkan khusus, yaitu di Kabupaten Luwu. Bahwa ada koreksi dan seterusnya rekap berjenjang itu saya kira di keterangan kami juga diterangkan secara jelas disana beserta renvoinya, beserta bukti-bukti yang ada, yang pada akhirnya masuk di rekap tingkat provinsi untuk Partai Demokrat. Kami tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran terkait pengurangan

suara di ... yang berkaitan dengan pokok permohonan tersebut, di tingkat provinsi.

Saya kira itu, Yang Mulia. Termasuk seperti di ... di ... yang berkaitan dengan ... di Luwu Timur ada ... apa ... intinya di sana semua semua penga ... hasil jajaran kami telah melakukan proses pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan, kalau ada dugaan pelanggaran dan seterusnya itu ditindaklanjuti dan seterusnya. Makanya, hal-hal yang lain karena berkaitan dengan Partai Demokrat keterangan kami, itu dianggap dibacakan. Berkaitan dengan (...)

828. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang di Luwu Timur itu di halaman 59, ya?

829. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Persi ... ya, benar, Yang Mulia.

830. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang di halaman 59 itu mengenai Bawaslu di Kabupaten Luwu Timur?

831. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ya benar, Yang Mulia. Ada ... yang seperti ada beberapa ... terdapat anak kecil yang belum memiliki hak pilih, namun ikut mencoblos. Ada ... ada keterangan kami di atas, tindak lanjutnya, dan seterusnya, hasil pengawasan-pengawasan jajaran pengawas kami.

Selanjutnya, yang berkaitan dengan Kabupaten Gowa, yaitu Ernest. Ya, di keterangan kami juga, kami anggap dibacakan. Bahwa ada laporan yang berkaitan dengan caleg yang namanya Ernest dan itu juga telah ditangani secara prosedur, yaitu laporannya tidak teregister oleh Bawaslu Kabupaten Gowa karena tidak memenuhi syarat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan seterusnya, hal-hal yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

832. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya

833. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Saya kira itu, Yang Mulia.

834. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Kami kembalikan, Pak Ketua, untuk bukti dan alat buktinya.

835. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ke persoalan bukti, saya mulai dari Pihak Terkait dulu deh. Pihak Terkait itu ... yang tadi Kuasa Hukumnya ... yang anu itu yang sudah dilengkapi, ya tanda tangan semua, ya?

836. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Sudah, Yang Majelis.

837. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang mau diserahkan nanti, ya?

838. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Ya.

839. HAKIM KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ke persoalan bukti ... saya mulai dari Pihak Terkait dulu deh. Pihak Terkait itu ... yang tadi kuasa hukumnya ... yang anu itu, sudah dilengkapi ya tanda tangan semua, ya?

840. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Sudah, Yang Majelis.

841. HAKIM KETUA: I DEWA PALGUNA

Yang mau diserahkan nanti, ya?

842. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Ya.

843. HAKIM KETUA: I DEWA PALGUNA

Ya, sebab itu catatan yang mau kami berikan, ada 10 kuasa hukum, kalau enggak salah belum tanda tangan itu ... 10 apa 11 itu ya, sebelumnya itu. Kemudian, yang persetujuan tertulis dari DPP Partai Demokrat untuk Pihak Terkait itu atas nama yang terkait dengan Muhammad Dhevy Bijak, DPR RI Dapil Sulsel III dan Miswar Wahyudi Natsir untuk DPR Kabupaten Kota Selayar Dapil V, itu tapi, di sini kan ndak ada permohonan untuk ... apa namanya ... Dapil V itu, ya. Ini kayaknya ada terkait dengan permohonan lain ini. Karena yang di Selayar Dapil V itu ada yang diajukan oleh PKS, mungkin ke sana?

844. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Izin, Majelis. Kalau Dapil V, saya khusus untuk Dapil Sosial III DPR RI.

845. HAKIM KETUA: I DEWA PALGUNA

Ha?

846. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Saya khusus Pihak Terkait Dapil Sosial III DPR RI yang sudah ada surat kuasanya, Majelis, dari Pak SBY.

847. HAKIM KETUA: I DEWA PALGUNA

Ya, itu, ndak maksudnya surat persetujuannya menyangkut ke situ mungkin gelondongan atau bagaimana ini? Baik. Ya, Anda juga mau menyampaikan softcopy, ya? Nanti ya? Ya, oke.

Jadi, nah dari itu yang catatan kami, kemudian yang satu lagi mudah-mudahan sekarang sudah ada karena tadi Bukti PT-6 yang Anda ajukan itu belum ada ininya ... belum ada buktinya. Apakah sekarang sudah ada? Nanti kami cek lagi. Nah, dari situ kemudian ... dari bukti yang Anda ajukan dari Pihak Terkait bukti yang bisa kami sahkan itu adalah Bukti PT-1, Bukti PT-5, dan Bukti PT-7 sampai dengan PT-22. Itu yang bisa kami sahkan.

848. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Izin, Majelis, untuk Bukti P-6 kami cabut, kami enggak ajukan, jadi khusus P-6 kami enggak ajukan.

849. HAKIM KETUA: I DEWA PALGUNA

P-6 dicabut, ya?

850. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAMALUDDIN RUSTAM

Ya

851. HAKIM KETUA: I DEWA PALGUNA

Bukti itu dicabut. Berarti kalau begitu, PT-1, Bukti PT-5, Bukti PT-7 sampai dengan PT-22 itu bisa kami sahkan, ya? Baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian, dari Termohon, ya, ada ... ada beberapa daftar bukti yang terpotong, ya?

852. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Siap, Yang Mulia.

853. HAKIM KETUA: I DEWA PALGUNA

Sehingga sulit kami baca itu. Ini yang ... kemudian yang sekarang untuk Dapil Sulawesi Selatan III itu mulai 001 sampai dengan 009, betul ya?

854. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Betul, Yang Mulia.

855. HAKIM KETUA: I DEWA PALGUNA

Baik.

KETUK PALU 1X

Itu bisa disahkan. Kemudian, untuk Dapil Kota Luwu Timur II 001 sampai dengan 008 juga?

856. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Betul, Yang Mulia.

857. HAKIM KETUA: I DEWA PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Gowa, Dapil Gowa I, 001 Gowa I sampai dengan 004 Gowa I dan seterusnya, betul?

858. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Betul, Yang Mulia.

859. HAKIM KETUA: I DEWA PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Baik, sudah semua yang dari Termohon. Kemudian yang dari Bawaslu ... Alat Bukti PK-27.2065 itu yang belum ada bukti fisiknya, Bawaslu? Nomor 65, Pak.

860. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Nomor 65, Yang Mulia?

861. HAKIM KETUA: I DEWA PALGUNA

Ya, itu belum ada bukti fisiknya.

862. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Baik.

863. HAKIM KETUA: I DEWA PALGUNA

Dan saya ingatkan lagi, kayanya untuk Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan belum ada surat tugas, mungkin sekarang mau diserahkan atau bagaimana?

864. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Sudah, sudah, Yang Mulia.

865. HAKIM KETUA: I DEWA PALGUNA

Sudah?

866. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Sudah, Yang Mulia

867. HAKIM KETUA: I DEWA PALGUNA

Kapan?

Oh, yang barusan tadi diambil itu? Oh, ya, ya, terima kasih. Ya. Itu yang tadi sudah disampaikan.

Baik, yang sekarang bukti yang kami sahkan itu di luar dari yang 65 itu dari 32 sampai dengan, ya sampai dengan 65 nya tentu ini, ya tadi dengan catatan itu. Di luar itu bisa kami sahkan baik.

KETUK PALU 1X

Yang dari Pemohon ada penyerahan ... belum menyerahkan softcopy bukti yang diberi tanda, sori yang belum menyerahkan daftar bukti ... daftar alat bukti yang disebutkan dari P-1 sampai dengan P-26.

868. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Izin Yang Mulia, softcopy P-25, P-26 hari ini, Yang Mulia, tapi daftar buktinya sudah saya serahkan. Sama kartu advokat sudah saya serahkan.

869. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Softcopy-nya, softcopy-nya dari bukti (...)

870. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Habis sidang saya serahkan, Yang Mulia.

871. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya nanti. Ya, itu kami mau mengingatkan saja.

872. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA

Terima kasih, Yang Mulia.

873. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Demikian, Yang Mulia kita akan lanjutkan untuk perkara berikutnya. Dari partai Ger ... Gerindra, pasa ... untuk Perkara Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerindra. Mohon berkenan, Yang Mulia, Pak Suhartoyo.

874. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Untuk partai Gerindra Termohon mengajukan eksepsi yang pertama kedudukan ... kewenangan karena ini menyangkut proses maka, Mahkamah tidak berwenang. Kemudian, yang kedua, kedudukan hukum karena ini sengketa internal, sehingga partai tidak punya legal standing termasuk kemudian, tidak ada rekomendasi. Kemudian, yang ketiga, mengenai perbaikan permohonan awalnya yang diajukan hanya DPRD Makassar di dalam perbaikan ada tambahan Gowa Dapil VI dan Maros I, Pangkep II, benar ini Termohon?

875. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, betul, Yang Mulia.

876. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Betul, ya?

877. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Betul.

878. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada renvoi?

879. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ada.

880. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana? Kalau yang itu sudah klir, ya? Betul itu, ya?

881. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Dapil betul.

882. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Untuk renvoi yang mana?

883. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Untuk renvoi di sini kami (...)

884. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau sambil jalan?

885. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, ada diutamakan, Yang Mulia.

886. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, yang mana?

887. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Di tabel 4, halaman 15.

888. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman 15, tabel 4. Oke.

889. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Itu tentang perolehan suara atas nama Mustarin Dg Mase tertulis (...)

890. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mustarin, Mustarin.

891. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Mustarin.

892. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mustarin Dg Mase?

893. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya. 1.955 sebelumnya awalnya, seharusnya=1.953.

894. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang Termohon?

895. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya.

896. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Versi Termohon, ya?

897. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Termohon.

898. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1.953. Pemohon?

899. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ini menurut Termohon, Yang Mulia.

900. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pemohonnya? Tetap?

901. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Sama. Tetap 1.955.

902. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya. Terus, itu saja?

903. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ada masih di halaman 15 atas nama ... siapa ... calon Nurulinda.

904. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

S.Sos.

905. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, Nurulinda. Itu harusnya nama Nurlinda.

906. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nurul?

907. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Nurlinda.

908. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nurlinda? U-nya hilang?

909. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, tertulis sebelumnya Nurulinda, nama sebenarnya Nurlinda, S,Sos.

910. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nurlinda, ya?

911. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya.

912. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mustarin benar?

913. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Betul.

914. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda kok kayak ragu-ragu begitu. Sudah mengubah nama orang masih ragu-ragu pula.

915. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Baru terima, Yang Mulia.

916. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nurlinda, ya?

917. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, Nurlinda.

918. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Apa lagi?

919. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Yang ke-3, angka 3 sub 3, untuk petitum.

920. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di petitum, ya?

921. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Petitum angka 3.

922. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

923. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Itu jumlah suara Mustarin Dg Mase.

924. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mustarin di ... 3.3, ya?

925. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Angka 1 tabel 3.3, ya.

926. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1.953 lagi?

927. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, betul. Tertulis 1.955 itu seharusnya 1.953.

928. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nurlindanya tidak diganti? Anda bagaimana ini.

929. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, direnvoi juga otomatis Nurlinda.

930. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Otomatis memang Hakim mesin apa? Nurlinda?

931. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, betul, Yang Mulia.

932. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu saja, Pak?

933. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, itu saja renvoinya.

934. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke langsung ke dalil-dalil itu.

935. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Baik.

936. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di 3 dapil itu bagaimana ceritanya, respons Anda terhadap dalil Pemohon.

937. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Eksepsi tadi sudah dikemukakan, Yang Mulia, ya.

938. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

939. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Kemudian, di pokok perkara untuk Dapil I Makasar IV terkait terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama Kasrudi di Daerah Pemilihan Kecamatan Manggala, Kelurahan Biring Rombang, dan Kelurahan Ba ... Batua sebanyak 256 suara, adalah tidak benar. Menurut fakta hukum berdasarkan bukti DA-1 Kecamatan Manggala, Kota Makassar perolehan suara atas nama Kasrudi, S.H., di wilayah Kecamatan Manggala yang benar, menurut data Pemohon, yaitu sebagaimana tabel (...)

940. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tabel 2, dianggap dibacakan.

941. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Itu diuraikan, dianggap dibacakan.

942. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung ke?

943. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ini (...)

944. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dalilnya mau dibacakan?

945. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Karena berupa penjelasan.

946. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Nomor berapa? Yang huruf apa? ...

947. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Dari mulai angka 1 ... maaf ... ini seharusnya ada angka 1.

948. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

A apa?

949. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

A, b, c.

950. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

A, b, c, terus? Angka 1-nya di mana?

951. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ini angka 1-nya tertinggal ini.

952. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1a ini maksudnya?

953. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Betul, 1a maksudnya.

954. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1a, b, c, terus nanti nomor 2.

955. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya. 1a, b, c, berikutnya angka 2 dan angka 3 di halaman 12.

956. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mau dibaca yang mana?

957. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia semuanya.

958. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

959. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, kemudian, di Dapil Kabupaten Gowa.

960. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gowa VI?

961. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, Gowa VI. Ini ada tabel persandingan suara menurut Termohon dan Pemohon atas nama Hj. Ria Efendi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gowa. Suara ... nama calon Nasruddin, S.Sos.

962. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dg Sitakka.

963. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Dg Sitakka. Perolehan suara menurut Termohon 2.640. Suara menurut Pemohon 2.692. Selisih 11.

964. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

965. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, yang kemudian yang kedua, HR. Ria Efendi, perolehan suara menurut Termohon 2.692, menurut Pemohon 2.646.

966. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

967. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ada selisih -17.

968. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

969. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Nah bahwa terhadap adanya dalil Pemohon tentang selisih suara di atas, menurut Termohon, diuraikan dalam poin 1, 2, 3, dan 4.

970. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, Pak, sebentar, Pak.

971. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, Pak Majelis.

972. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

HR atau Hj Ria Effendi itu?

973. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Hajah, Ini koreksi lagi rupanya.

974. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak ini, kalau ini orang Jawa, Haji Raden ini.

975. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, Yang Mulia.

976. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Hajah, ya?

977. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya.

978. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini orang Makassar ini kalau ... maaf, ya ... kalau gelar tinggi pun enggak ... lebih terhormat dipanggil haji di sana itu.

979. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, ya.

980. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi penting sekali.

981. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Baik, Yang Mulia.

982. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Profesor, doktor itu nomor dua, yang penting haji dan hajjah itu yang harus lebih diutamakan.

983. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, baik, Yang Mulia.

984. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

985. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Dilanjut Ke Dapil Pangkep, Pangkajene dan Kepulauan II. Ini dalam tabel persandingan suara. Nama Calon Hj. Mustarin ... H. Mustarin Dg Mase, perolehan suara menurut Termohon 1.955 tadi sudah dilakukan renvoi, Yang Mulia, ya?

986. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

987. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Kemudian, menurut Pemohon 1.953.

988. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1.953. Oke.

989. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Kemudian, untuk Hj. Nurlinda, S.Sos. 2.006 menurut Pemohon (...)

990. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

1.937?

991. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

1.937. Ada selisih 44.

992. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dalilnya dibacakan?

993. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Dianggap dibacakan.

994. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. 1 dapil lagi.

995. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Satu dapil lagi untuk Dapil Maros. Ini Dapil Maros ada tabel terkait perolehan suara partai politik. Ada untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten di wilayah Pemilihan Maros I Provinsi Sulawesi Selatan.

996. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

997. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ini tabelnya terurai, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

998. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Ya, ada. Dalilnya dibacakan?

999. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya. Dalilnya terkait dengan adanya ... apa namanya ... dalil permohonan halaman 14, 18, angka 3 di (...)

1000. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

33? 3.3 atau 3 yang di atas?

1001. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Dimulai di 3 dari atas, Yang Mulia halaman 18.

1002. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, silakan!

1003. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Baik. Bahwa mohon perhatian terhadap dalil pokok Pemohon halaman 14 sampai 18 yang pada pokoknya memuat persoalan dugaan pelanggaran administratif oleh Ketua KPPS pada 16 TPS di Kelurahan Pettuadae Kecam ... Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros menurut Termohon adalah diuraikan sebagaimana fakta di angka (...)

1004. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dibacakan.

1005. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

3.1, 3.2, 3.3 (...)

1006. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan!

1007. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Itu dianggap dibacakan. Sampai dengan angka 3.5, Yang Mulia.

1008. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. 4?

1009.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Angka 4. Bahwa pada pokoknya persoalan terkait adanya dugaan pelanggaran administratif di beberapa TPS Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros yang dipersengketakan oleh Pemohon dalam pokok permohonan a quo merupakan permasalahan yang sama. Serta dengan yang sama dengan objek yang sama dengan persoalan yang diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Maros pada saat pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 yang lalu. Dimana pada pokoknya, terhadap permasalahan tersebut telah terselesaikan dengan diterbitkannya Putusan Bawaslu Nomor 002/Adm/Bwsl-Maros, dan seterusnya bertanggal 20 Mei 2019.

Untuk kemudian, telah ditindaklanjuti dengan baik sampai dengan ditetapkannya Keputusan Termohon, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987, dan seterusnya Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

5. Bahwa dengan demikian khususnya terhadap hasil perolehan suara Pemohon pada kegiatan pemilu untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Maros Tahun 2019 telah ditetapkan sesuai prosedur pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya tidak cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima, terlebih lagi mengabulkan permohonan Pemohon a quo.

1010. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1011.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Demikian dua paragraf ini tidak ... dianggap dibacakan.

1012. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Petitum?

1013.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Petitum. Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diuraikan di atas, Termohon memohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan dalam eksepsi ... mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 987/PL, dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan yang benar untuk Dapil Makassar IV Kota Makassar, sesuai dengan tabel.

1014. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1015. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Makasruwa ... kas ... maaf. Nomor 1 Kasrudi, S.H., perolehan suaranya 3.943.

1016. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1017. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Untuk ta ... nama-nama lain dalam tabel, dianggap dibacakan. Kemudian, untuk Dapil Gowa VI, Kabupaten Gowa itu sesuai dengan tabel, Nomor 1 Nasruddin, S.Sos., Dg Sitakka dengan perolehan suara 2.640. Kemudian dua, Hj. Ria Efendy, ini tertulis masih H.R.

1018. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Hj. Ria Efendy.

1019. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Hj. Ria Efendy 2.692 suara.

1020. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2.692 suara.

1021. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Kemudian untuk Dapil Pangkajene dan Kepulauan II. Nama calon, H. Mustarin Dg Mase suara ... perolehan suara 1.953. Kemudian yang kedua, Hj. Nurlinda, lagi-lagi Nurul Linda ini.

1022. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nurlinda, tadi sudah diralat.

1023. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, 2.006.

1024. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1025. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Tiga ... empat, Kabupaten Maros. Dapil Kabupaten Maros I, suara par ... perolehan suara parpol dicantumkan dalam tabel nomor 2, Gerindra memperoleh suara 2.756, perolehan suara partai lain dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Tertanda, Kuasa Hukum Termohon. Demikian, Yang Mulia.

1026. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih. Ada Pihak Terkait? Tidak ada. Bawaslu, Pak berkaitan 3 dapil tadi, bagaimana? Langsung jelaskan, Pak!

1027. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keterangan terhadap Permohonan Partai Gerindra di Dapil Makassar, Gowa, Pangkajene Kepulauan, dan Maros. Secara berurutan kami menyampaikan keterangan dimulai dari (...)

1028. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Makassar?

1029. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Makassar. Untuk Makassar pada permohonan ... Pokok Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, kemudian Batua. Pada pokoknya Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa di ... berkaitan dengan dalil posita Pemohon ... berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu Bawaslu Kota Makassar. Dari hasil pengawasan yang terekam dalam laporan hasil pengawasan, tidak satu pun hasil pengawasan yang ... yang ditindaklanjuti atau yang mengandung temuan untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran, itu untuk Makassar.

1030. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Makassar.

1031. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Lalu, kemudian untuk Kabupaten Gowa, mohon maaf, Yang Mulia untuk Makassar ini di keterangan Bawaslu itu di halaman 45 ... 456 sampai 462.

1032. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

456?

1033. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

456 sampai 462.

1034. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1035. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Selanjutnya untuk Kabupaten Gowa. Kabupaten Gowa ini berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa, dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat telah mengeluarkan ... merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Bajeng Barat untuk membuka kotak suara guna melihat C-1 Plano pada TPS 5 Desa Tanah Bangka.

1036. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena ada pengaduan atau temuan, Pak?

1037. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Temuan, Yang Mulia.

1038. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Temuan.

1039. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Ya.

1040. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah ditindaklanjuti itu?

1041. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Dilakukan koreksi administrasi. Lalu (...)

1042. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1043. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Lalu, kemudian selanjutnya Bawaslu Kabupaten Gowa juga telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Saudari Hj. Ria Efendy pada tanggal 10 Mei.

1044. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1045. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Namun, laporan tersebut berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Gowa, laporan tidak memenuhi syarat formil. Lalu kemudian selanjutnya (...)

1046. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berarti tidak ada tindak lanjut, Pak, ya?

1047. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Tidak ada tindak lanjut, Yang Mulia.

1048. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

1049. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Tidak ada registrasi.

1050. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1051. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Lalu kemudian selanjutnya, berdasarkan pleno Bawaslu Kabupaten Gowa terhadap laporan yang tidak dapat diregistrasi karena lampau waktu, itu dilakukan investigasi untuk memastikan apakah laporannya ini memang (...)

1052. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini masih yang berkaitan Ibu Ria ini?

1053. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Masih, Yang Mulia.

1054. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke.

1055. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Dilakukan investigasi lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta materiil. Namun, dari hasil investigasi berdasarkan Bawaslu Kabupaten Gowa tidak ada ... tidak menemukan alat bukti yang cukup, sehingga tidak memenuhi syarat materiil untuk dilanjutkan sebagai temuan.

1056. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, oke. Ada upaya hukum lagi yang bersangkutan?

1057. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Tidak ada lagi, Yang Mulia.

1058. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada lagi. Sudah inkraht, ya?

1059. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Siap, Yang Mulia.

1060. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1061. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Tidak dijadikan temuan.

1062. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, artinya sudah tidak ... tidak ada upaya hukum, itu sudah mempunyai kekuatan tetaplah.

1063. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Siap, Yang Mulia.

1064. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk yang laporan Ibu Ria tadi. Sudah selesai untuk Gowa?

1065. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Sudah selesai (...)

1066. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk (...)

1067. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Masih Gowa, Yang Mulia.

1068. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1069. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Bawaslu Kabupaten Gowa juga telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh Saudara Irvan Arifin, pada tanggal 8 Mei. Terkait dengan tidak ditemukannya surat suara yang tidak digunakan oleh apa ... Model C-7 dalam kotak suara.

1070. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, apa responsnya?

1071. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Berdasarkan hasil kajian awal, Bawaslu Kabupaten Gowa menyatakan laporan yang diajukan oleh Saudara Irvan belum memenuhi syarat materil karena tidak ada bukti.

1072. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1073. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Bawaslu Kabupaten Gowa telah menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya. Sehingga batas waktu yang telah disampaikan oleh pelapor tidak dapat melengkapi laporannya, sehingga laporan tidak diregistrasi.

1074. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1075. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Itu untuk Gowa, Yang Mulia.

1076. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1077. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Lalu, kemudian untuk Gowa. Ini keterangannya pada keterangan kami itu di halaman 467 sampai 468.

1078. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1079. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Lalu, kemudian selanjutnya Kabupaten Pangkep. Kabupaten Pangkep ini pada pokoknya memang tidak ada hasil pengawasan yang kemudian (...)

1080. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ditemukan pelanggaran?

1081. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Berdampak menjadi temuan pelanggaran, sama dengan Makassar, Yang Mulia.

1082. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke.

1083. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Keterangan kami di halaman 473 sampai 476.

1084. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Sekarang Maros.

1085. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Kemudian, Kabupaten Maros, Kabupaten Maros itu memang kami melalui Bawaslu Kabupaten Maros juga memang telah melakukan penanganan penyelesaian pelanggaran administrasi Nomor 002, yang

berkaitan dengan daftar pemilih khusus yang dianggap ada penyimpangan di situ. Namun, berdasarkan putusan Bawaslu, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran maupun laporan ... maaf bukan putusan. Hasil pemeriksaan Bawaslu bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran maupun laporan dan para saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat itu. Ini apa namanya ... terungkap dalam fakta persidangan penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros, Yang Mulia. Keterangan untuk Kabupaten Maros, itu, Yang Mulia.

1086. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1087. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Cuma itu yang khusus.

1088. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1089. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Itu diterangkan pada halaman 481, 489.

1090. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Cukup?

1091. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

1092. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Pak. Itu Pak Ketua, terima kasih.

1093. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Jadi karena sudah ini, tidak ada Pihak Terkait. Jadi, saya tinggal menganukan ... mengkonfirmasi bukti saja. Hanya ada catatan, ini kayaknya dari Pemohon juga belum melampirkan kartu advokatnya, ya? Pemohon? Siapa untuk Pemohon untuk perkara ini?

1094. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya, Majelis.

1095. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, belum, ya?

1096. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Sudah terlengkap semua, Majelis.

1097. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa kartu advokatnya sudah?

1098. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Sudah semua.

1099. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kapan disertakan?

1100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Pada saat selesai sidang minggu yang lalu.

1101. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ini catatannya masih ada yang nunggak ini.

1102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik, nanti akan (ucapan tidak terdengar jelas).

1103. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, nanti dicek aja. Mungkin juga kami yang terselip bisa jadi, bisa jadi.

1104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik.

1105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Yang Mulia?

1106. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari mana?

1107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Dari Termohon.

1108. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

1109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ini terkait untuk pengesahan alat bukti. Pada sidang sebelumnya, ada alat bukti dari Termohon yang belum ter ... apa namanya ... ternazegelen atau terleges.

1110. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang nomor berapa itu?

1111. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

T-004 Makassar IV, T-004 Gowa VI, kemudian T-003 Pangkep II.

1112. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekarang sudah itu?

1113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Kami sudah siapkan sekarang.

1114. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, itu memang jadi catatan ini.

1115. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya.

1116. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di ... di apa namanya (...)

1117. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Catatan sidang minggu yang lalu.

1118. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang Makassar IV?

1119. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, betul.

1120. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terus, Gowa.

1121. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Gowa 004.

1122. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Kemudian 003.

1123. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Pangkep II.

1124. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pangkep, ya? Pangkep II.

1125. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya.

1126. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul?

1127. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Betul, Yang Mulia.

1128. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, sekarang sudah diini?

1129. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Sudah disediakan.

1130. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Coba diambil Petugas! Jadi, kalau begitu catatan untuk anu ... untuk Termohonnya biar sekalian karena sudah ini. Jadi, tidak ada catatan lagi untuk Termohon.

1131. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya.

1132. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kecuali kami mau mengkonfirmasi jumlah bukti saja untuk (...)

1133. KUASA HUKUM: PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Majelis, izin, Majelis.

1134. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dulu! Yang ini ... saya mau ini dulu. Ya, nanti nanti saya akan berikan. Untuk Termohon, untuk Pangkep II, ya. Pangkajene dan Kepulauan untuk Dapil II. Itu Anda mengajukan bukti dari T-001 sampai 007, ya? Pangkajene dan Kepulauan II.

1135. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Sampai dengan?

1136. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

007.

1137. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

007. Ya, Yang Mulia.

1138. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, betul.

KETUK PALU 1X

Jadi, termasuk yang sudah dileges tadi itu. Karena ada catatannya itu tadi sudah diini. Kemudian, untuk Kota Makassar IV, dari 001 sampai dengan 005?

1139. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, betul, Yang Mulia.

1140. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Gowa VI, Kabupaten Gowa VI, 001 sampai dengan 011.

1141. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, betul, Yang Mulia.

1142. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian Maros I, 001-006 ... sampai 006? Itu yang tidak ada masalah?

1143. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDY MULYANA

Ya, betul, Yang Mulia.

1144. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk ini ... sebentar, ya, sekalian dulu ke belakang, deh. Dari Bawaslu karena ini sudah lengkap dari PK-27.22 1 sampai dengan 46, betul?

1145. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: ADNAN JAMAL

Betul, Yang Mulia.

1146. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ya.

KETUK PALU 1X

Bawaslu tidak ada persoalan, kemudian ini untuk Pemohon, sebenarnya buktinya lengkap ini dari ... yang diberi ... untuk kabu ... apa namanya ... Dapil Pangkajene dan Kepulauan Dapil II itu dari de ... jadi, 19 sampai dengan 29, ya?

Pemohon?

1147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya. Benar, Majelis. Tetapi kemarin kami sampaikan juga untuk melengkapi sebagai lampiran dari bukti tambahan sebelumnya, hari ini sudah kami siapkan 3 lembar (...)

1148. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar, Pak, kan daftar bukti Bapak kami sudah beritahukan terakhir menyerahkan buktinya itu kapan, kalau tambah lagi tidak bisa.

1149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Kami melampirkan sebagai ... sebagaimana kelengkapan kemarin, catatan untuk kekurangannya.

1150. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, itu yang, yang di ... yang disampaikan pada sidang waktu pemeriksaan pendahuluan?

1151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya. Yang Pangkajene.

1152. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang itu ... itu sudah ... itu (...)

1153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Sudah.

1154. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Sudah, diserahkan saja nanti.

1155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik.

1156. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi yang sekarang ini, saya mau konfirmasi dulu yang untuk Dapil II, 19 sampai 29, ya?

1157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya, Majelis.

1158. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak ... betul.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang Maros I, 30A sampai dengan 45A?

1159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Benar, Majelis.

1160. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ah, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Makassar IV, 1 sampai dengan 13?

1161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Ya, Majelis.

1162. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

KETUK PALU 1X

Lalu Gowa, yang terakhir 1 sampai dengan 11?

1163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Benar, Majelis.

1164. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah.

KETUK PALU 1X

Catatan saya atau catatan kami adalah untuk semua bukti yang sudah diserahkan itu Bapak belum menyerahkan softcopy-nya.

1165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Kami siapkan, Majelis.

1166. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Nanti sekalian dengan yang tadi itu, ya?

1167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik.

1168. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih.

1169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Maaf, Majelis, renvoi yang kemarin diminta, itu kami siapkan juga (...)

1170. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Itu kan kalau ... kalau memang diminta, kan memang harus diserahkan. Supaya kami ada ketegasan (...)

1171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik. Kami siapkan sekalian.

1172. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekalian nanti dengan yang di belakang, ya.

1173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI

Baik. Terima kasih, Majelis.

1174. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terima kasih. Silakan selanjutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, kami mohon untuk Perkara Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

1175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Siapa yang akan sampaikan untuk?

1176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Saya, Yang Mulia. Dari (...)

1177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada eksepsi?

1178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Ada, Yang Mulia.

1179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Mengenai apa eksepsi Anda?

1180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

1181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, tidak berwenang.

1182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Tidak berwenang.

1183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena sudah menyangkut proses?

1184. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Ya. Kemudian (...)

1185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau legos ... anu ... obscur?

1186. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Kemudian tentang (...)

1187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Obscur apa?

1188.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Obscur itu karena ketidakjelasan karena alasan bahwa beberapa dalil tidak menyebutkan jumlah perolehan suara, baik di rekapitulasi tingkat TPS sampai tingkat kecamatan.

1189.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Ya.

1190.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Kemudian (...)

1191.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian (...)

1192.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Hanya dua itu eksepsinya, Yang Mulia.

1193.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eksepsinya cuma 2?

1194.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Ya.

1195.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Pokoknya mengenai Dapil IV?

1196.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Ya. Dalam Pokok Permohonan itu kita akan ... apa ... tentang ... berkaitan dengan Dapil Sulawesi Selatan IV dan DPRD Kabupaten Toraja Utara. Untuk Dapil Toraja Utara III, Yang Mulia.

1197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1198. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Kemudian yang pertama, ingin kami sampaikan bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan petitum Pemohon dalam bentuk lisan maupun tertulis, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik (...)

1199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1200. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon. Kemudian yang nomor 2, yang pertama kita akan ... kami ... kami akan mempersandingkan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi.

1201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Di tabel bacakan! PDIP berapa?

1202. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

PDIP, perolehan suara untuk Termohon ... versi Termohon adalah 2.004 (...)

1203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

24.632.

1204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

24.632 suara. Kemudian, Pemohon menyampaikan 24.752 suara. Dengan demikian (...)

1205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Selisih berapa?

1206. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Selisihnya ada 120 suara.

1207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. PAN berapa?

1208. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Kemudian untuk yang Partai Amanat Nasional itu ada 20 ... untuk Termohon 25.158 suara, kemudian Pemohon mendalilkan 24.690 suara.

1209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1210. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Dengan demikian selisihnya 468 suara, Yang Mulia. (...)

1211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

468.

1212. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut. Satu. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 120 suara adalah tidak benar (...)

1213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak benar.

1214.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Sebagaimana Bukti T-003, Yang Mulia.

1215.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang penambahan?

1216.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Kemudian bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional sebanyak 468 suara adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-3, Yang Mulia untuk Sulawesi Selatan.

1217.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini, oke, rinciannya ini mau dibacakan? Jeneponto?

1218.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Kemudian, rinciannya Kabupaten Jeneponto sampai dengan tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1219.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Bantaeng?

1220.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Kemudian sama, halaman 5 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1221.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang Bantaeng juga?

1222.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Ya. Kemudian untuk tanggapan, kami bacakan. Bahwa berdasarkan alat bukti menjadi dasar Termohon untuk membuat tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 tersebut di atas, maka:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Jeneponto sebanyak 52 suara adalah tidak benar.
2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Jeneponto sebanyak 242 suara adalah tidak benar. Kemudian yang B, Kabupaten Bantaeng, persandingan suara secara rinci, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1223. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1224.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARAN NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Sampai dengan halaman 7, mohon dianggap dibacakan. Halaman 8 juga demikian, halaman 9 juga sama, Yang Mulia. Kemudian, tabel di halaman 10 juga dianggap dibacakan, kami akan tanggapi. Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang menjadi dasar Termohon untuk membuat tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 tersebut di atas, maka:

Satu, Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon sebesar 53 suara serta adanya penggelembungan atau penambahan terhadap perolehan suara Partai Amant Nasional sebesar 121 suara atau adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Bantaeng untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan IV adalah tidak benar.

1225. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

1226.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARAN NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Kemudian yang C, Kabupaten Kepulauan Selayar, persandingan suara secara rinci bahwa ini adalah tabel, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, sampai dengan hal 12. Kemudian, disusul juga di halaman 13, Yang Mulia, dan terakhir untuk halaman 14, tabel mohon dianggap

pula dibacakan, kami akan tanggap. Berdasarkan alat bukti tertulis yang menjadi dasar Termohon untuk membuat tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4 tersebut di atas, maka:

1. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya kesalahan perhitungan perolehan suara dan rekapitulasi perhitungan suara di Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan IV yang meliputi:
 1. Kecamatan Benteng adalah tidak benar.
 2. Kecamatan Bontoharu adalah tidak benar.

1227. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak usah, tidak benarnya ndak usah dibaca terus.

1228. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARAN NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Ya, oke. Dan seterusnya sampai (...)

1229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Semua tidak benar?

1230. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARAN NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Semua tidak benar, Yang Mulia. Oke, yang D, Kabupaten (...)

1231. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Toraja?

1232. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARAN NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Toraja Utara, DPRD Kabupaten Toraja Utara Dapil III, persandingan suara secara rinci, untuk tabelnya mohon dianggap dibacakan.

1233. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dibacakan.

1234. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARAN NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara Partai Hanura pada Daerah Pemilihan Toraja III sebanyak 2.527 suara adalah tidak benar.

1235. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

1236. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARAN NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Perolehan suara Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan Toraja III sebanyak 2.579 sebagaimana Bukti T-019, Yang Mulia, dan seterusnya. Selebihnya dalil-dalil Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran pemungutan suara untuk DPRD Kabupaten Toraja Utara Dapil III adalah tidak benar karena permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Toraja sebagaimana Bukti T-022, dan seterusnya. Kemudian, saya masuk petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang menjatuhkan ... untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV yang benar adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1237. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1238. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARAN NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Sampai dengan anu ... atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, terima kasih, Yang Mulia.

1239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Ini tidak ada Pihak Terkait, langsung ke Bawaslu, langsung ke dapil yang dipersoalkan, Pak. Tanggapannya bagaimana? Ada kejadian-kejadian yang khusus dan penanganannya seperti apa kalau ada?

1240. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Keterangan kami dari hasil pengawasan dan temuan laporan berkaitan dengan pokok permohonan ... PDIP sebagaimana yang teregister ... perkara yang teregister Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan seterusnya. Satu, kami mulai dari pokok perkara ... Pokok Permohonan yang berkaitan dengan Dapil Keanggo ... Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV, yaitu Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Selayar. Terutama terkait dengan dugaan penggelembungan suara partai tertentu dan pengurangan suara Pemohon dan seterusnya. Jadi, dan ini keterangan kami, telah kami serahkan beserta renvoinya itu di halaman 203 sampai 259.

1241. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1242. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Singkatnya (...)

1243. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sampaikan, Pak. Untuk Kabupaten Jeneponto, untuk Kabupaten Jeneponto itu berkaitan dengan pokok ... misalnya, jajaran Bawaslu Kabupaten Jeneponto itu telah melakukan pengawasan secara berjenjang berkaitan dengan rekap perolehan suara.

Nah, hasil pengawasan yang berdasarkan laporan pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Jeneponto, tidak pernah menerima informasi awal temuan maupun laporan terkait dugaan pengelembungan suara PAN dan pengurangan suara pemohon yang terjadi di sejumlah kecamatan. Itu ada juga di keterangan kami dianggap dibacakan. Bahwa pernah ada surat yang masuk di jajaran Bawaslu Jeneponto dari PDIP dan seterusnya itu dilakukan proses ... apa (...)

1244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Verifikasi?

1245. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Verifikasi dan seterusnya, dan seterusnya.

1246. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

1247. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Dan hasilnya tidak menemukan dugaan pelanggaran di sana. Ada di keterangan kami dan lain-lain dianggap dibacakan. Begitu pula bahwa Bawaslu Jeneponto tidak pernah menerima informasi awal temuan laporan terkait dengan terjadinya pengelembungan suara PAN dan pengurangan suara Pemohon (...)

1248. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PDIP.

1249. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Yang terjadi di sejumlah kecamatan terkait dengan permohonan.

1250. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1251. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Begitu pula, di Kabupaten Selayar.

1252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bantaeng belum, Pak?

1253. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Bantaeng mohon maaf, Yang Mulia. Bantaeng, demikian pula di Kabupaten Bantaeng kurang lebih sama dengan Kabupaten Jeneponto.

Jajaran pengawasan Kabupaten Bantaeng juga telah melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur dan hal-hal yang lain di ... apa misalnya (...)

1254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak disurat seperti yang terjadi di Jeneponto? Surat dari PDIP.

1255. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Kami tidak menemukan adanya surat tersebut, seperti yang ada di Jeneponto.

1256. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi?

1257. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Keterangan hasil pengawasan terakhir di sini dari jajaran pengawas kami yaitu, bahwa Bawaslu Kabupaten Bantaeng beserta jajaran tidak pernah menerima laporan awal dugaan pelanggaran, temuan, dan seterusnya terkait dengan dugaan pengelembungan dan seterusnya terkait dengan dugaan pengelembungan suara perolehan suara PAN dan pengurangn per ... perolehan suara (...)

1258. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PDIP.

1259. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

PDIP.

1260. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, tidak ada sama sekali?

1261. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Tidak ada sama sekali.

1262. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, kalau begitu pindah Selayar.

1263. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Pindah Selayar. Hal yang sama di Kabupaten Selayar, Yang Mulia.

1264. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1265. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ada proses-proses tertentu di proses rekapitulasi, ya.

1266. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1267. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Tentu sesuai tertera ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya ada keberatan saksi segera ditindaklanjuti pada saat itu juga terkoreksi dan seterusnya.

1268. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Laporan, pengaduan, temuan?

1269. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ya, kalau ada pertemu ... dan seterusnya itu ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1270. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ada apa tidak, Pak? Kalau untuk Selayar tidak ada yang sifatnya khusus (...)

1271. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Kami tidak menemukan itu di hasil laporan pengawas kami di sana, Bawaslu Kabupaten Selayar.

1272. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, tidak ada, ya? Termasuk dugaan penggelembungan suara PAN yang PDIP keberatan, itu tidak ditemukan adanya ... apa ... fakta di sana.

1273. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Siap, Yang Mulia. Dan itu lebih terkonfirmasi di keterangan tertulis kami di halaman 203 sampai 257.

1274. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Ada tambahan?

1275. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Berkaitan dengan Kabupaten Tanah Toraja.

1276. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Toraja.

1277. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Toraja dan Toraja Utara.

1278. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Toraja.

1279. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Di Toraja Utara hasil pengawasan dan temuan laporan di sana, di jajaran pengawas kami bahwa telah juga dilakukan pengawasan secara berjenjang. Misalnya, berkaitan dengan adanya pegelembungan dengan cara ... dan seterusnya, apa yang kami sampaikan di sini walau ada di keterangan tertulis bahwa pernah ada laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten (...)

1280. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Toraja.

1281. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Toraja Utara, yaitu dengan adanya surat dari PDIP Toraja Utara. Perihal, ada suratnya. Perihal menyampaikan dugaan pelanggaran di TPS Tondon Sitaba dan seterusnya berupa adanya penambahan pengelembungan suara. Nah, dari surat tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara meminta kepada ... menyerahkan formulir laporan kepada yang bersangkutan, tetapi untuk menetapkan sebagai ... tetapi tidak diisi, tetapi Bawaslu Tora ... Toraja Utara justru menjadikan informasi awal untuk menginvestigasi.

1282. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1283. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Jadi, intinya keterangan di sana tidak (...)

1284. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Meskipun tidak mengisi formulir tetap menginvestigasi?

1285. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Meskipun karena memang ada wewenang kami, (ucapan tidak terdengar jelas) untuk melakukan proses investigasi.

1286. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa hasil intevigasinya?

1287. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Hasil investigasi dijadikan temuan, itu menjadi temuan dugaan pelanggaran tentu ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

1288. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada ... ada bentuk pelanggarannya?

1289. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ada, yang sebagaimana yang ada di halaman 257 di keterangan kami dibuktikan.

1290. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa itu, Pak?

1291. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Yaitu, untuk ... apa ... untuk yang didalilkan di sini Bawaslu Kabupaten Toraja Utara berpendapat bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh DPC PDIP nomor sekian dan seterusnya belum melewati proses penanganan pelanggaran atau kajian. Belum dapat dikategorikan pelanggaran sebagaimana persyaratan dilakukan PSU dan seterusnya. Terkait informasi awal yang saya sampaikan tadi karena ada juga yang memang berkaitan dengan itu, kami sering sampaikan bahwa itu ditindaklanjuti melalui ketentuan tindak pidana di Sentra Gakkumdu.

1292. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang apa itu, Pak?

1293. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Yang, tadi itu, Yang Mulia. Yang adanya dugaan tindak pidana yang tadi ada surat yang ... yang tadi tidak diterima laporannya, tapi Bawaslu Toraja Utara menjadikan temuan hasil kajiannya temuan itu adalah temuan untuk dugaan pelanggaran tindak pidana.

1294. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah ditangani Gakkumdu?

1295. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Sudah ditangani Gakkumdu.

1296. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa bentuk pelanggaran itu, Pak?

1297. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Dan hasilnya dihentikan karena tidak memenuhi pelanggaran pidana oleh proses klarifikasi dan seterusnya.

1298. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kalau yang didalilkan KPU di Bukti 022 itu apa, Pak? Toraja Utara, itu yang dimaksud? Karena permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara. Bukti T-022 ini buktinya KPU sih, cuma connecting enggak dengan Bapak ... yang Bapak ceritakan baru saja ini?

1299. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Di ... memang di sini ada renvoi kami ... perbaiki kami mengenai alat-alat buktinya, Yang Mulia.

1300. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya nanti ke Pak Ketua kalau alat bukti. Maksud saya begini, Pak. Yang Bapak ceritakan baru saja yang ke Gakkumdu, tapi kemudian tidak bisa ditindaklanjuti. Itu (...)

1301. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Melalui putusan.

1302. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya. Melalui Putusan Gakkumdu kan?

1303. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ya, status ... status ... status di situ, Yang Mulia.

1304. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu yang dimaksudkan KPU itu? Satu kasus itu?

1305. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Ya, satu kasus itu.

1306. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya. Toraja Utara, ya?

1307. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Toraja Utara.

1308. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Artinya kan, klop keterangan Saudara KPU dengan Bawaslu itu. Saya hanya cross saja sambil random supaya (...)

1309. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Terima kasih, Yang Mulia.

1310. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Pak Ketua, silakan!

1311. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Saya kira itu Yang Mulia, terima kasih.

1312. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Yang pada persidangan sebelumnya untuk Pemohon, ya?

Untuk Pemohon itu sudah diminta untuk melakukan perbaikan untuk Bukti P-96, P-114, P-143, P-153 sudah diperbaiki dan bisa kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, kemudian untuk Termohon, Termohon ini catatan kami itu untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil IV, Bukti T-012 itu belum dileges, ya?

T-012, di ... da ... Sulawesi Selatan, DPR Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV. Itu bukti P-012 nya belum dileges.

1313. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Ya, Yang Mulia.

1314. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti, ya.

1315. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Nanti kami susulkan, Yang Mulia.

1316. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, selainnya dari ... kami konfirmasi dulu Anda menyerahkan bukti untuk Dapil IV Sulawesi Selatan ini, 001 sampai 018, ya?

1317. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Ya, Yang Mulia.

1318. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul.

KETUK PALU 1X

1319. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Betul, Yang Mulia.

1320. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, kemudian untuk Kabupaten Toraja Utara III. Anda ... ini buktinya lengkap. Anda menyerahkan dari 001 sampai 022?

1321. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM MUNANDAR

Betul, Yang Mulia.

1322. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian, yang Bawaslu, kalau yang untuk permohonan dari PDIP ini, itu Anda menyerahkan bukti dari Bukti 71 sampai 107, betul?

1323. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Benar, Yang Mulia.

1324. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Benar? 71 sampai 107? Ini tidak ada ... ada ... ada ... tambahan lagi? Sudah?

1325. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AZRY YUSUF

Tidak ada, Yang Mulia. Mau menyampaikan juga, Yang Mulia, tadi yang ditanyakan Majelis Yang Mulia itu PK-27, PK-21 apa sudah terkonfirmasi, ternyata saya baru cek, terkonfirmasi sesuai dengan nar ... keterangan dengan bukti yang mendukungnya, Yang Mulia. Terima kasih.

1326. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya, baik, ya. Ini sudah bisa disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, ini untuk sekarang tinggal yang terakhir untuk ... jadi, dengan pemeriksaan ini untuk Perkara Nomor 79-03-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah selesai. Tinggal sekarang untuk gelombang pertama ini, perkara dari Partai Persatuan Pembangunan, Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, mohon berkenan, Yang Mulia, Pak Wahid.

1327. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Siap, Yang Mulia.

1328. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kita lanjutkan untuk Partai Persatuan Pembangunan untuk mendengarkan jawaban Termohon, keterangan

Pihak Terkait PBB, Pihak Terkait Nasdem dan kemudian keterangan Bawaslu. Silakan!

1329. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bisa saya mulai untuk membacakan jawaban.

1330. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan! Saya kira terus saja.

1331. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Terima kasih.

1332. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1333. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Yang pertama, dalam eksepsi, Yang Mulia.

1334. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1335. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Bahwa Mahkamah Konsitusi tidak berwenang untuk memutus, menyelesaikan, mengadili perkara ini dengan alasan yang pertama adalah karena sepanjang mengenai Permohonan pada pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Takalar Daerah Pemilihan I pada penambahan atau perbaikan Permohonan. Dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1336. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya kira dianggap dibacakan, ya.

1337. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, baik, Yang Mulia. Kemudian, dalam eksepsi obscur libel ini juga dianggap sudah dibacakan karena Pemohon menggabungkan Permohonan Partai Politik sama Permohonan Perseorangan.

1338. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1339. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian, lanjut untuk ... dalam Pokok Permohonan, yang untuk persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR RI, Yang Mulia. Halaman 5 pada tabel, Yang Mulia.

1340. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1341. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Mohon izin, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

1342. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Dapil Sulawesi Selatan III, ya? Ya, selanjutnya?

1343. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di setiap lembang Kelurahan pada 5 kecamatan yang didalilkan Pemohon, yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Pada tabel ini, Yang Mulia. Halaman 7.

1344. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1345. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Nah, kemudian bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan tingkat Kabupaten Tanah Toraja pada 5 Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Di bawah ini, Yang Mulia, pada tabel.

1346. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, persandingan.

1347. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Halaman 8, dianggap sudah dibacakan. Kemudian untuk perolehan suara Partai Nasdem di setiap lembang atau kelurahan pada 7 kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon (...)

1348. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Apa itu? Setiap lembang, apa itu?

1349. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Desa, Yang Mulia.

1350. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya.

1351. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya. Itu juga (...)

1352. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan!

1353. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARAN NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Itu juga sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia pada tabel tersebut, halaman 9, halaman 10.

1354. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya. Ya, Halaman 10.

1355. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Nah, kemudian bantahan kami terhadap pokok-pokok jawaban tersebut pada halaman 11, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara dapil Pemohon ... bahwa setelah penetapan perolehan suara tingkat KPU provinsi, perolehan suara Pemohon, yaitu Partai Persatuan Pembangunan telah berkurang untuk Pemilu Anggota DPR-RI, Dapil Sulawesi Selatan III yang meliputi ... ini semuanya dianggap sudah dibacakan dan merupakan hal yang tidak benar, Yang Mulia.

1356. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1357. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian bahwa dalil Pemohon, terjadi pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan dan penambahan suara Partai Nasdem setelah penetapan perolehan suara tingkat KPU provinsi adalah tidak benar dan tidak mungkin terjadi karena rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan perolehan suara dilakukan secara berjenjang dari bawah, dari kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat.

1358. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Halaman 13 itu, ya?

1359. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, Yang Mulia.

1360. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Apa ... dalil nomor 11, ya. Silakan, petitum! Yang untuk ini.

1361. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Nah, untuk petitumnya. Berdasarkan seluruh uraian tersebut sebagaimana di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

1. Dalam eksepsi menerima eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dan seterusnya, Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Kemudian untuk selanjutnya adalah Dapil DPRD Kabupaten Takalar I, Yang Mulia.

1362. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1363. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Pada tabel halaman 15 yang atas itu adalah persandingannya.

1364. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1365. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian penghitungan suara tingkat TPS, desa atau kelurahan, dan kecamatan yang benar menurut Termohon itu adalah pada tabel 15 itu, Yang Mulia, masih yang bawah, Yang Mulia.

1366. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Sampai halaman?

1367. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Sampai halaman (...)

1368. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

20, ya?

1369. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

21, Yang Mulia.

1370. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

1371. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian langsung pada pokok jawabannya, Yang Mulia.

1372. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan!

1373. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Pada halaman 29.

1374. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1375. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA

Yang Mulia, mohon izin. Yang itu sudah dianggap dibacakan.

1376. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Langsung ke petitum kalau begitu?

1377.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

29, Yang Mulia.

1378.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

29, ya?

1379.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya. Bahwa semua hasil perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Takalar untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Takalar Daerah Dapil I yang meliputi ini semua di TPS yang didalilkan Pemohon merupakan hal yang tidak benar, Yang Mulia.

1380.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1381.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian langsung ke petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk putusan, sebagai berikut.

1. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

1382.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya Pihak Terkait dari Partai Bulan Bintang!

1383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Bulan Bintang akan memberikan keterangan Pihak Terkait untuk Dapil Takalar I. Pada pokoknya keterangan Pihak Terkait dari Partai Bulan Bintang, khususnya mengenai penambahan dan pengurangan selisih suara yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan, pada pokoknya sama dengan jawaban dari Pihak Termohon. Untuk selanjutnya akan kami uraikan:

Pertama, dalam eksepsi, permohonan Pemohon tidak jelas. Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana, oleh siapa, di mana, dan kapan terjadinya pengurangan dan penambahan suara tersebut. Seandainya terjadi hal demikian, tentunya Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir DA-2 ataupun mengajukan laporan kepada Bawaslu, tapi nyatanya Pemohon tidak melakukan hal tersebut.

1384. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA

Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jumlah total penambahan yang Pemohon dalilkan di posita dengan jumlah total penambahan pada penghitung Pemohon ... saya perjelas, persandingan perolehan suara pada tabel 1 halaman 8, Pemohon tertulis penambahan PBB plus 59. Namun, dalam uraiannya pada poin 1c halaman 9 sampai dengan poin 1k, halaman 10 apabila dijumlahkan, total penambahan suara untuk PBB adalah 60 suara.

Selanjutnya, masuk dalam pokok perkara bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil Kabupaten Takalar I, Provinsi Sulawesi Selatan menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Dapil Kabupaten Takalar I tabel 1, persandingan perolehan suara partai politik menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan ... mohon izin, Yang Mulia, tertulis DPRK, mohon direnvoi jadi DPRD, halaman 2.

1386. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

1387. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA

Adalah sebagai berikut.

Partai Bulan Bintang 3.024 suara.

Partai Persatuan Pembangunan 2.991 suara.

Menurut Pihak Terkait dan menurut Pemohon, Partai Bulan Bintang 2.965 suara. Partai Persatuan Pembangunan 2.995 suara. Sehingga, terdapat selisih plus 59 dan -4.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Moncongkomba, Kecamatan Polombangkeng Selatan sebanyak 3 suara. Di TPS 3 Desa Rajaya, Kecamatan Polombangkeng sebanyak 1 suara adalah tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa terjadinya penambahan-penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang di TPS 3 Desa Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang sebanyak 11 suara. TPS 1 Desa Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang sebanyak 3 suara, TPS 5 Desa Patte Ne, Kecamatan Polombangkeng Selatan sebanyak 1 suara, TPS 2 Desa Parang Baddo, Kecamatan Polombangkeng Utara sebanyak 1 suara, TPS 10 Desa Patallasang, Kecamatan Patallasang sebanyak 8 suara, TPS 4 Desa Bajeng, Kecamatan Patallasang sebanyak 1 suara, TPS (...)

1388. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya sudah, dianggap dibacakan.

1389. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA

Dianggap dibacakan. Semuanya tidak benar, Yang Mulia. Sebagaimana bukti kami lampirkan dalam Bukti PT-7 sampai dengan PT-13.

1390. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1391. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA

Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan a quo jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan, tidak beralasan dan tidak mendasar. Hal mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut di atas, yang telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Termohon. Sehingga, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima.

Untuk selanjutnya petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 per tanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil Kabupaten Takalar I yang benar adalah sebagai berikut.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk tabelnya ini direnvoi karena posisi perolehan suaranya terbalik, Yang Mulia. Nomor urut ... Partai Bulan Bintang 19. Partai Persatuan Pembangunan, Nomor Urut 10, perolehan suara partai Termohon, Partai Bulan Bintang 3.024 dan Partai Persatuan Pembangunan 2.991.

Menurut Pemohon Partai Bulan Bintang 2.965. Partai Persatuan Pembangunan 2.995. Selisih plus 59 dan plus 4. Cukup. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

1392. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Lanjut, dari Pihak Terkait, Partai Nasdem!

1393. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia.

1394. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi, sebelumnya saya ingatkan ya, Pak! Nasdem itu, permohonan dari Pihak Terkaitnya bukan ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen, ya? Langsung ke Kuasa, ya?

1395. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Betul, Yang Mulia.

1396. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan dibacakan kalau begitu!

1397. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Yang dibacakan keterangan kami ini Pak atau surat dari ketua umum?

1398. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang keterangan yang Anda buat sebagai Pihak Terkait kami bacakan.

1399. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Oke. Terima kasih.

1400. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya cuma mengingatkan bahwa permohonannya untuk jadi Pihak Terkait itu tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen Partai Nasdem itu. Itu yang saya sampaikan.

1401. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Oh, terima kasih, Yang Mulia. Tapi, hari ini yang kami akan masukkan permohonan yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen.

1402. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, itu kalau Ketentuan Pasal 23 nya itu kan kapan itu harusnya itu? Ya, itu. Tetapi, silakanlah nanti diajukan saja, ya. Silakan dibacakan keterangannya dulu!

1403. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia.

1404. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok-pokoknya saja, ya!

1405. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Pokok-pokoknya saja.

1406. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Eksepsi, terus langsung kepada pokok permohonan.

1407. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Apa yang belum kami bacakan dalam keterangan Pihak Terkait ini, Yang Mulia. Mohon dianggap dibacakan.

1408. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1409. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Dalam eksepsi. Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1410. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, supaya dianggap dibacakan.

1411. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara Partai Nasdem di perhitungan tingkat kabupaten atau Db-1. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan

secara rinci di TPS mana saja terjadinya penambahan perolehan suara Partai Nasdem tersebut.

Bahwa karena Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara rinci di TPS mana saja permohonan suara Pihak Terkait digelembungkan atau ditambahkan, sehingga, Pihak Terkait mengalami kesulitan untuk menjawab dalil-dalil Pemohon untuk mempertahankan.

1412. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1413. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Hak konstitusional Pihak Terkait.

1414. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya ... yang 5 itu saya kira sama saja itu.

1415. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang Pokok Permohonan.

Kami akan membagi 2, Yang Mulia. Karena pada prinsipnya Termohon membuat dalilnya 1, dalil penambahan perolehan suara Partai Nasdem. Dua, dalil pengurangan perolehan suara P3.

1416. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1417. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Bahwa mengenai dalil Pemohon atas terjadinya penambahan suara Pihak Terkait, Partai Nasdem dari TPS 04 Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu Toraja Utara Sulawesi Selatan adalah tidak benar dan tidak beralasan dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Bahwa faktanya perolehan suara Partai Nasdem di TPS 04 tersebut berdasarkan perhitungan Model T-1 DPR Dapil Sulsel adalah sebanyak 31 suara, bukan 731 suara, Bukti PT-02 dan selanjutnya.

- b. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara Model DAA-1 DPR Dapil Sulsel III sinkron dengan Model C-1 DPR Dapil Sulsel III, Bukti PT-3.
- c. Model DA-1 DPR Dapil Sulsel penjumlahannya sinkron dengan hasil rekapitulasi Model AA DPR Dapil Sulsel III, Bukti PT-4.
- d. Model DB-1 DPR Dapil Sulsel III penjumlahannya sinkron dengan hasil rekapitulasi Model DAA DPR Dapil Sulsel III, Bukti PT-5.

1418. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Saya kira itu sama. 1, 2, sampai 6 itu dalil mengenai penambahan perolehan suara Partai Nasdem, ya?

1419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARAN NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Betul, Yang Mulia.

1420. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tidak usah dibacakan. Ke B saja. Dalil pengurangan.

1421. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Pengurangan?

1422. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

1423. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Bahwa mengenai pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon, dalam permohonannya di Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja sebanyak 2 suara, dalil Pemohon poin 7 adalah tidak benar dan ... karena fakta yang terjadi walaupun ada keberatan Pemohon ataupun pihak lain ketika perhitungan suara di KPPS telah diselesaikan tanpa keberatan Pemohon ataupun pihak lain saat rekapitulasi di tingkat PPK, serta tidak ada keberatan dari Pemohon ataupun pihak lain ketika rekapitulasi suara di tingkat kabupaten.

1424. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Saya kira 10, 11, 12 itu uraian mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon, ya.

1425. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Betul, Yang Mulia.

1426. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Saya kira langsung ke (...)

1427. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

13, Yang Mulia.

1428. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

13, ya.

1429. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PARULIAN SIREGAR

Ya. Yang Mulia bahwa dalam Petitem Permohonan Pemohon poin 4.1.1 meminta penetapan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 267.571 suara. Dan suara Pemohon sebesar 85.079 suara. Bahwa jumlah suara dalam petitem Pemohon ... Permohonan Pemohon ini apabila dikabulkan tidak dapat mengubah keadaan perolehan kursi. Karena apabila dihitung dengan perhitungan sainte lague murni untuk mendapatkan raihan kursi kedua DPR RI Dapil Sulsel III, setelah dibagi 3 maka perolehan suara Pihak Terkait tetap melebihi jumlah perolehan suara Pihak Pemohon ($267.571:3=89.190$). Sedangkan, raihan suara Pemohon yang dimohonkan pada petitem permohonan adalah sejumlah 85.079 suara. Dengan demikian, raihan suara Partai Nasdem tetap melebihi jumlah suara Pemohon.

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Petitem.

Dalam eksepsi.

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara,

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dan seterusnya, sepanjang perolehan suara Partai Nasdem yang di daerah pemilihan Sulawesi Selatan III.
3. Menetapkan perolehan suara partai Nasdem ... maaf, kami ulangi ... tiga menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III yang benar adalah sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dan seterusnya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Majelis.

1430. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kita lanjutkan, keterangan dari Bawaslu.

1431. BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN: AMRIYADI

Terima ka ... Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan tertulis dari Bawaslu dalam Perkara Nomor 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Persatuan Pembangunan yang mempersoalkan perolehan suara beberapa Dapil Pemilihan Sulsel III, khususnya di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

Berdasarkan hasil pengawasan dan rekapitulasi yang berjenjang yang dilakukan, baik tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan sampai pada tingkat kabupaten tidak ada laporan maupun temuan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Tana Toraja. Bahwa proses koreksi administrasi yang dilakukan dalam rekap secara berjenjang yang dihadiri oleh para saksi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme prosedur dan tata cara yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk Toraja Utara, juga tidak menemukan adanya keberatan-keberatan, laporan, dan temuan-temuan, namun memang ada laporan yang diajukan oleh Teofilus R. Sibala yang kemudian ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dengan materi laporan adalah dugaan penggelembungan suara yang dilakukan dengan mengubah jumlah perolehan suara peserta pemilu calon anggota DPR RI tertentu berdasarkan daftar bukti yang diperoleh dari situng KPU.

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Toraja Utara setelah dianggap memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta ketera ... keterangan yang didukung dengan bukti ... alat atau barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran pemilu penggelembungan suara yang dilakukan dengan mengubah jumlah

perolehan suara peserta pemilu atau calon anggota DPR RI tertentu berdasarkan data atau bukti yang diperoleh dari situng KPU tidak melanggar ketentuan pidana pemilu, sehingga laporan tersebut ditetapkan bukan pelanggaran pemilu. Demikian pula, yang untuk Sidenreng Rappang, Enrekang, dan Luwu, serta Luwu Utara, Luwu Timur, dan Pinrang, selanjutnya Palopo, juga tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau temuan ... yang apa ... yang ditemukan oleh pengawas pemilu. Semua catatan kegiatan khusus, dicatatkan dalam Formulir Model DB rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.

Selanjutnya, untuk permohonan mempersoalkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil I Kabupaten Takalar. Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilu terhadap laporan dengan Nomor Registrasi 002/LP/PL/ADM/KAB/27.18/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan pelapor Makmur Mustakim S.H., dan terlapor ketua dan anggota KPU Kabupaten Takalar dengan uraian laporan sebagai berikut. Untuk TPS 02 Desa Moncongkomba, Kecamatan ... Moncongkomba ... Kecamatan Polombangkeng Selatan Model C-1 situng berjumlah 12 suara, sementara Model DAA-1 sebanyak 13 suara, tidak sah. Artinya, ada penambahan jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara di TPS tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti dan keterangan dari pelapor, saksi dan terlapor diperoleh fakta persidangan bahwa benar pada TPS 02 Moncongkomba, Kecamatan Polombangkeng Selatan, suara sah sebanyak 12, namun hal tersebut telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi menjadi suara sah sebanyak 13 dalam rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa fakta persidangan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Takalar berkesimpulan dan memberikan putusan yang pada pokoknya menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan per ... peraturan perundang-undangan. Itu terhadap TPS 02 Desa Moncongkomba dengan ... TPS 02 Kelurahan Pappa Kecamatan Patallasang.

Ya, berdasarkan hasil pengawasan memang telah terjadi koreksi administrasi yang dilakukan secara ... apa ... di hadapan forum rekap pleno di tingkat kecamatan dan kabupaten yang disaksikan oleh pihak yang seharusnya hadir, yaitu saksi-saksi dan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Bahwa terhadap ketidaksamaan antara salinan Formulir Model C-1 DPRD kabupaten/kota dengan Model DB-1 Kabupaten Takalar, itu telah dilakukan koreksi atau perbaikan administrasi pada salinan Formulir C-1 DPRD kabupaten/kota. Kesimpulannya bahwa proses yang dilakukan di ... rekap berjenjang telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

1432. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, dikembalikan ke Pak Ketua untuk buktinya.

1433. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Bukti Pemohon ini sudah lengkap, ada dari ... ada ... apa namanya ... tambahan bukti yang diserahkan, yaitu P-24 sampai dengan P-74, ya. Pemohon, betul.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang untuk Termohon, untuk Dapil Sulawesi Selatan III dari dua ... T-001 sampai T-007? Termohon?

1434. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, Yang Mulia

1435. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul.

KETUK PALU 1X

Tidak ada catatan untuk itu. Untuk Dapil I Kabupaten Takalar, T-001 sampai T-019?

1436. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, Yang Mulia?

1437. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ada catatan di sini yaitu bahwa untuk T-015 berupa putusan Bawaslu Kabupaten Takalar, itu tidak ada di dalam daftar bukti, ya? Tapi, ada bukti fisiknya maksudnya, gitu. Jadi di daftar tidak ada ... di buktinya ... apa namanya ... ada gitu.

1438. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya.

1439. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, nanti itu catatannya seperti itu. Kemudian NT-016 untuk Takalar berupa kumpulan C-1, DAA-1, dan DA-1 di Kecamatan Polombangkeng itu ... apa namanya ... tidak ada dalam daftar bukti, ya? Mau tetap disertakan? Ya?

1440. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARAN NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, Yang Mulia.

1441. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, itu disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pihak Terkait Nasdem, Anda menyerahkan bukti sudah lengkap bukti P-1 sampai dengan P-5, ya? Nasdem betul? Baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian, demikian juga untuk P ... apa namanya ... P ... P ... apa itu Bawaslu. Bawaslu, Anda menyerahkan bukti yang diberi tanda PK-27.18 dari 117 sampai 152.

1442. BAWASLU PROVINSI SULSEL: AZRY YUSUF

Benar, Yang Mulia.

1443. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

KETUK PALU 1X

Lalu, ini ada sedikit tambahan untuk ... apa nih ... Pihak Terkait PBB. Buktinya P-1 sampai dengan P-13, ya?

1444. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA

Ya, benar, Yang Mulia.

1445. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi belum dileges itu?

1446. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA

Kemarin sudah diserahkan yang legesnya, Yang Mulia.

1447. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ah, catatan kami belum ada. Apa sudah ada diserahkan? Yang leges berupa fotokopi itu?

1448. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA

Yang fotokopi per tanggal 10. Yang PT-7 sampai PT-13.

1449. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

PT berapa?

1450. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA

PT-7 sampai PT-13, Yang Mulia.

1451. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi Anda benar menyerahkan 1 sampai 13, ya?

1452. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA

Ya, benar.

1453. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang 7 sampai 13? Coba nanti di belakang dikoreksi lagi, ya?

1454. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRFAN MAULANA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

1455. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang jelas buktinya sudah oke, sudah benar. Oke disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, dengan demikian untuk yang kelompok pertama ini kita persidangan sudah kita lampau.

Selanjutnya, kami ingin menyampaikan pengumuman bahwa untuk pemeriksaan kelanjutan dari persidangan ini, itu nanti akan dilakukan pemanggilan melalui surat panggilan dan mela ... dan melalui email kemungkinan juga ditelepon biasanya kami seperti itu. Tetapi, mana-mana perkara yang akan dipanggil itu tidak bisa kami umumkan sekarang dan kapan itu akan disidangkan juga belum bisa ditentukan sekarang.

Nah, jadi Saudara-Saudara bersiap-siap saja menerima. Kalau tidak menerima panggilan berarti tidak, perkaranya tidak lanjut dan nanti akan diketahui juga lewat persidangan pleno yang disampaikan oleh Mahkamah 9. Karena kami harus melakukan RPH yang berkait mana perkara yang akan lanjut atau tidak. Nah, itu jadi nanti akan kelanjutan dari perkara yang disidangkan ini akan diketahui setelah adanya surat panggilan dari Mahkamah begitu, ya.

Baik, dengan demikian persidangan selesai dan sidang saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11:31 WIB

Jakarta, 16 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001